



MAJALAH Parlementaria

EDISI 209 • TH. 2022



**Mudik Lebaran 2022:
Sinergi
Lancarkan
Silaturahmi**



7 25272 73070 6



“**Mudik Lebaran 2022: Sinergi Lancarkan Mudik**”. Ini merupakan tema yang diusung Tim Redaksi untuk Majalah Parlementaria 209. Fenomena mudik sudah membudaya bagi masyarakat Indonesia di setiap perayaan Idul Fitri. Apalagi di tahun 2022 ini merupakan pertama kali (sejak pandemi 2020), pemerintah melonggarkan persyaratan bagi masyarakat yang ingin berlebaran di kampung halaman.

Karena sudah membudaya, pemerintah harus memastikan aktivitas mudik masyarakat tidak terkendala. Butuh sinergi lintas sektoral agar masyarakat merasakan kenyamanan selama perjalanan.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak, yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi agar perjalanan mudik merayakan idul fitri pada tahun ini dapat berjalan dengan baik.

Di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi mengulas persiapan penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi. Selain beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon jemaah, terdapat juga penambahan biaya haji. Namun penambahan tersebut sepenuhnya di-cover melalui nilai manfaat dan dari dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 sampai 2019.

Sedangkan di Rubrik Anggaran, membahas mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi maskapai kebanggaan Indonesia yang sudah disepakai di Komisi VI DPR RI. Selanjutnya di Rubrik Legislasi, Tim Redaksi mengupas mengenai RUU Penanggulangan Bencana yang dihentikan pembahasannya akibat tidak adanya titik temu antara legislatif dengan eksekutif.

Masih banyak lagi yang disajikan Tim Redaksi Parlementaria seperti rubrik Sorotan, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

Parlementaria



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI



Parlementaria

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds, Prima Danutirto, A.Md,

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, urahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsa Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Arnanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciari, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulstiwati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhat Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Parlementaria

EDISI 209 • TH. 2022



4	DINAMIKA PARLEMEN	34	KUNKER
	DEFEND ID : Upaya Pemajuan Industri Pertahanan Tanpa	56	SOROTAN
	Bebani Anggaran		Untung-Rugi Larangan Ekspor CPO
5	MIMBAR DEMOKRASI	58	LIPUTAN KHUSUS
	DPR Terima Aspirasi dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa		Jadi Satgas IPU, Fadli Zon Dorong Langkah Diplomasi
6	PROLOG		Konflik Rusia-Ukraina
	Mudik Lebaran 2022 : Sinergi Lancarkan Silaturahmi	60	DAPIL
	LAPORAN UTAMA	70	TOKOH
10	Sinergi Lancarkan Arus Mudik dan Balik		Edi Dimiyati : Sebarkan Minat Baca, Hampiri Pemustaka
12	Perbaikan Fasilitas dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Kunci		Dengan Kargo Baca
14	Manfaatkan Teknologi untuk Atur Lalu Lintas	72	PERNIK
16	Apresiasi Keterlibatan BUMN		Audit Internal, Komitmen Setjen DPR Wujudkan Lembaga
18	SUMBANG SARAN		<i>Good Governance</i>
	Evaluasi Angkutan Mudik Lebaran 2022	74	KIAT SEHAT
20	PENGAWASAN		Tips Jaga Kesehatan Kadar Kolesterol Dalam Tubuh
	Meski Pandemi, Pelayanan Haji Harus Maksimal		Setelah Lebaran
22	ANGGARAN	76	WISATA
	Selamatkan Garuda dengan PMN		Surga Bahari di Ujung Selatan Sulawesi
24	LEGISLASI	78	HOBİ
	RUU Penanggulangan Bencana: Tak Ada Titik Temu		Paryono : Tenteram Kala Berada di Kebun
26	FOTO BERITA	79	POJOK PARLE
28	FOTO STORY		Getar Pilu Ratapan Guru
30	PROFIL		
	HA. Bakri HM : Berawal Dari Panjat Pohon Kelapa, Berakhir di		
	Puncak Senayan		

DEFEND ID:

Upaya Pemajuan Industri Pertahanan Tanpa Beban Anggaran

Pemerintah **telah resmi** membangun perusahaan gabungan (*holding*) BUMN yang bergerak dalam industri pertahanan dan keamanan bernama Defence Industry Indonesia atau Defend ID. **Pembentukan *holding* ini bagian dari implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.**



Defend ID adalah grup dari lima BUMN yang khususkan diri dalam sejumlah platform, yaitu **Platform Udara (Dirgantara Indonesia), Platform Darat, Alat Berat, Senjata & Munisi (Pindad), Platform Laut, Pembuatan Kapal (PAL Indonesia), Sistem Elektronik (Len Industri), Bahan Berenergi Tinggi (Dahana).** Adapun PT LEN Industry ditunjuk menjadi induk dari *holding* tersebut, sesuai dengan PP 5/2022 tentang Penambahan PMN ke dalam modal saham PT LEN Industry. Apa tanggapan dewan terkait ini?

Wakil Ketua DPR RI - Sufmi Dasco Ahmad



“Dari sisi teknologi maupun desainnya, LEN sudah memenuhi syarat paling bagus. LEN sudah garap persinyalan MRT di Singapura dan di Bangladesh”

Anggota Komisi I DPR RI - Fadli Zon



“Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau sangat banyak. Jadi kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satu caranya dengan membuat *holding* ini”

Anggota Komisi VI DPR RI - Evita Nursanty



“Saya percaya jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, *holding* ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia dari sisi industri pertahanan”

Tujuan Holding:

1. Membangun kolaborasi inovasi nasional
2. Membangun kemandirian teknologi dan meningkatkan daya saing perusahaan
3. Menjadi bagian dari rantai pasokan global dengan mengembangkan kemitraan strategis global
4. Berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem industri dalam negeri
5. Pemenuhan kesiapan Alpalhankam menuju 100 persen *minimum essential force* di 2024
6. Solusi keterbatasan dukungan fiskal pemerintah, terbatasnya permintaan jangka panjang, hingga minimnya biaya riset dan pengembangan

Infografis: Andi Nurul

Target Alutsista MEF Tahap III (2024)

TNI AD



Senjata Ringan
723.564 unit



Kendaraan Tempur
3.738 unit



Meriam/Roket/Rudal
1.354 unit



Pesawat Terbang
224 unit

TNI AL



KRI
182 unit



Pesawat Udara
100 unit



Kapal Selam
8 unit



Kendaraan Tempur
978 unit

TNI AU



Pesawat
344 unit



Rudal
72 unit



Radar
32 unit



Penangkis Serangan Udara
64 unit



DPR Terima Aspirasi dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa

Sejumlah aliansi buruh dan mahasiswa 'geruduk' DPR untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mewakili buruh menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah agar memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melahirkan kebijakan dan regulasi. Sehingga ketika regulasi sudah diketok palu atau disahkan tidak menjadi polemik nantinya.

Aspirasi ini diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/2022).



Kami selaku Pimpinan DPR menerima aspirasi tersebut dan akan kami diskusikan untuk menjadi masukan bagi kami di DPR. Tentunya, hal ini akan kami ajukan juga ke pemerintah
- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad -



10 tuntutan aliansi buruh dan mahasiswa

1. Hentikan pembahasan UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan hentikan upaya Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
2. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM.
3. Turunkan harga (BBM, minyak goreng, PDAM, Listrik, Pupuk, PPN dan Tol).
4. Tangkap, adili, penjarakan, dan miskinikan seluruh pelaku koruptor.
5. Redistribusi kekayaan nasional (berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, rumah, fasilitas publik, dan nakan gratis untuk masyarakat).
6. Sahkan UU PRT dan berikan perlindungan bagi buruh migran.
7. Wujudkan reforma agraria sejati dan hentikan perampasan sumber-sumber agraria
8. Tolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
9. Berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi UU Sisdiknas.
10. Tolak revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Mudik Lebaran 2022: Sinergi Lancarkan Silaturahmi

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberi pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan grafik kasus Covid-19 cenderung menurun dan angka vaksinasi yang terus menanjak sesuai target. Masyarakat Indonesia menyambut momen ini. Pun, DPR RI, sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah berusaha memastikan setiap elemen bekerja sesuai dengan harapan masyarakat.





RENCANA dan skema dirancang sekaligus dieksekusi agar para pemudik menikmati setiap layanan transportasi dengan berbagai jenis moda dengan sebaik-baiknya. Komisi V

DPR RI mengawasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait yang mengemban tugas sebagai pelaksana teknis atas kelancaran Mudik 2022.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan, wajar jika mudik tahun ini melahirkan lonjakan di berbagai moda transportasi. Dirinya pun mengimbau, selain antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, para pemudik harus menjaga fisik, kualitas kendaraan, dan selalu memperbaharui kondisi jalan rute mudik terkini.

Di lain kesempatan, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan catatan evaluasi mudik dan balik 2022. Menurutnya, masih ada banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah atas penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini.

"Pertama harus dibenahi manajemennya, artinya pengaturannya. Kemenhub mengkaji harus benar-benar jangan hanya berdasar catatan saja. Tapi dengarkan pemudik langsung, survei. Jadi bukan hanya kajian atau berdasar laporan anak buah saja," terang Syahrul.

Di sisi lain, Polri bersama Kemenhub terus-menerus menyosialisasikan rute alternatif menuju Bandung dari Jakarta saat penerapan *one way*. Ketertiban masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendukung penanganan dan kelancaran arus mudik. Komisi III DPR mengapresiasi kebijakan 7 langkah Polri diantaranya *one way* lalu manajemen sistem di rest area dan rute alternatif yang telah diterapkan tersebut.

Kebijakan Polri dinilai oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sebagai langkah tepat sasaran nan presisi dalam membuat arus mudik dan arus balik berjalan kondusif. Polri juga dinilai telah berhasil dalam kolaborasi dengan Kementerian

Perhubungan dalam menunjang strategi yang antisipatif sehingga dalam arus mudik Lebaran 2022 ini tidak terjadi kemacetan seperti mudik-mudik sebelumnya.

Setali tiga uang, bersinergi dengan BUMN, Komisi VI DPR RI mengawasi persiapan dan penanganan arus mudik dan arus balik selama Lebaran Tahun 2022. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi kerja BUMN dalam menangani arus mudik dan arus balik. Dirinya mengungkapkan, jika diberikan skala nilai dari angka 1 sampai 10, maka 7,5 yang mewakilinya.

Pertama harus dibenahi manajemennya, artinya pengaturannya. Kemenhub mengkaji harus benar-benar jangan hanya berdasar catatan saja. Tapi dengarkan pemudik langsung, survei. Jadi bukan hanya kajian atau berdasar laporan anak buah saja

Syahrul Aidi Maazat
Anggota Komisi V DPR RI

Baginya, angka ini menandakan bahwa BUMN tidak boleh cepat puas untuk memecut diri bekerja lebih baik pada tahun mendatang. Lebih lanjut, terangnya, Komisi VI DPR RI akan melaksanakan rapat evaluasi bersama para mitra kerja pada masa persidangan ini.

Memang, berjibaku mengurus arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 bukan perkara mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Terlepas dari segala aral melintang, terwujudnya momen bertatap muka bersama keluarga hingga sanak saudara akibat Pandemi Covid-19, membuat kerinduan untuk mudik menyapa kampung halaman akhirnya terlampiaskan pada tahun ini. • tim

Detak Mudik 2022

Berdasarkan prediksi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Kemenhub) tanggal 22-31 Maret 2022, arus mudik tahun 2022 melonjak hingga 85,5 juta orang, jauh lebih besar dibandingkan arus mudik tahun 2019 yang hanya berkisar 34 juta pemudik.



8.9 juta orang

Pesawat

22.9 juta orang

Mobil pribadi

14.1 juta orang

Bus

16.9 juta orang

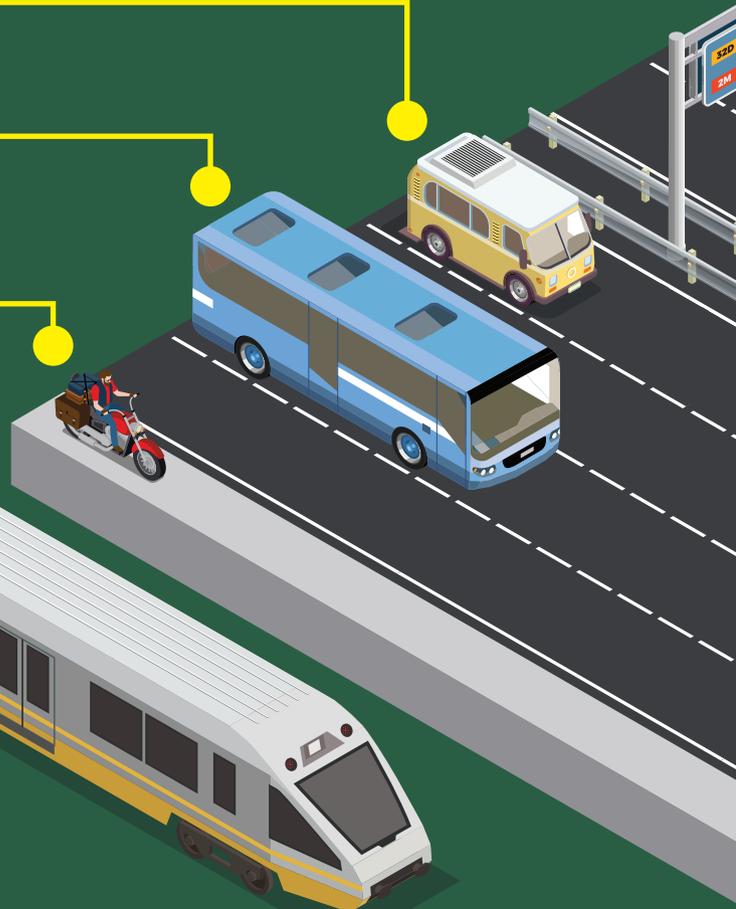
Sepeda Motor

8.2 juta orang

Kereta Api

2.4 juta orang

Kapal Laut



7 Mei 2022 atau H+5 Lebaran

sebanyak 45 unit kapal telah beroperasi dengan total 133 trip.



Perputaran uang selama mudik tahun 2022

Rp 28 triliun sampai Rp 42 triliun



Jasa Marga mencatat **1.295.930 kendaraan** kembali ke wilayah Jabotabek pada **H2 sampai H+5 Lebaran atau Idul Fitri 2022** pada 3-8 Mei 2022.

ONE WAY

sistem satu arah diberlakukan untuk kelancaran lalu lintas.

Rekayasa lalu lintas arus lebaran 2022

- Arus mudik 28 April – 1 Mei
- Arus balik 6 – 8 Mei 2022



142.377 pemudik

menyeberang melalui pelabuhan Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.



Angka kecelakaan pada arus mudik Lebaran 2022 mengalami **penurunan hingga 40 persen.** Bahkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan pada momentum mudik tahun ini menurun signifikan.



Sinergi Lancarkan Arus Mudik dan Balik

Perayaan Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena bisa dirayakan bersama sanak keluarga di kampung halaman



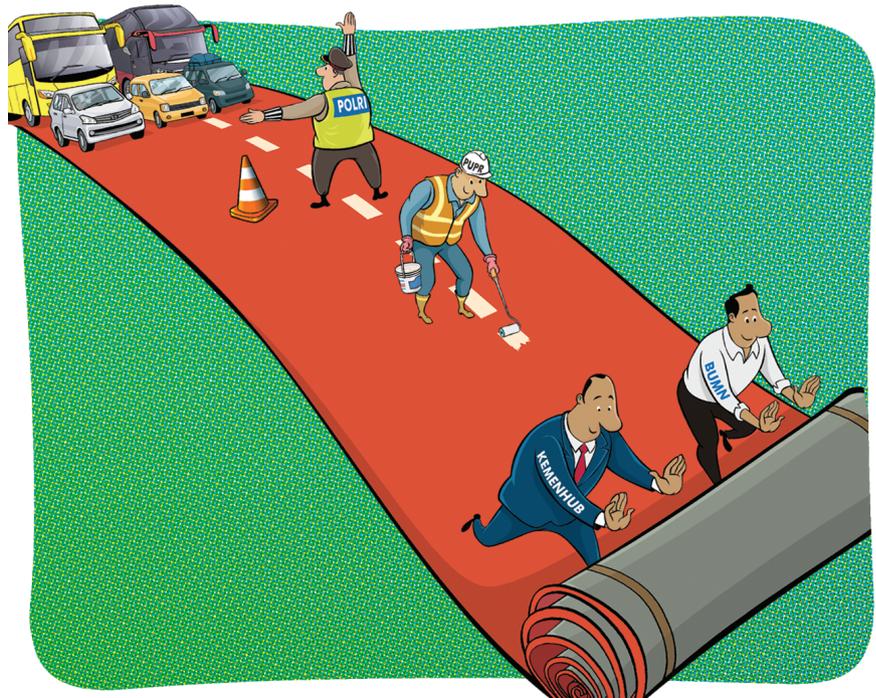
SETELAH dua tahun merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah mencabut larangan mudik lebaran pada

tahun ini dengan pertimbangan adanya tren penurunan kasus Covid-19.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, semangat gotong royong menghadapi pandemi Covid-19 merupakan kekuatan nasional yang harus dipertahankan. Ia juga berharap pemulihan sosial dan ekonomi menjadi semakin baik pada tahun 2023.

"Dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 saat ini dan penanganan dampak yang semakin kondusif, pada tahun 2023 diharapkan pemulihan sosial dan ekonomi sudah akan semakin baik, serta ancaman Pandemi Covid-19 telah berkurang, walaupun tetap perlu diantisipasi," papar Puan.

Dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V, Puan mengapresiasi kerja pemerintah dan seluruh pihak yang telah bekerja



memberikan pelayanan mudik selama libur Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

"DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak, yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi agar perjalanan mudik merayakan idul fitri pada tahun ini dapat berjalan dengan baik," kata Puan.

Meski sudah berjalan baik, ada sejumlah catatan terkait belum maksimalnya layanan mudik 2022. Misalnya rekayasa lalu lintas di jalan tol yang dilakukan belum sepenuhnya mencegah penumpukan kendaraan. Namun secara umum mudik lebaran 2022 bisa dinilai kondusif, karena gotong royong dan sinergi semua pemangku kepentingan dalam melancarkan arus mudik dan balik.

"Pencapaian yang kondusif ini, tidak terlepas dari kerja bersama kita, gotong royong, dalam

menangani Pandemi Covid-19. Kerja bersama, gotong royong, yang telah kita lakukan memberikan dampak positif yang memperlihatkan kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, vaksinasi yang terus meningkat, dan kegiatan sosial serta ekonomi masyarakat mulai kembali pulih secara bertahap," ungkap Puan.

Puan menilai, mudik lebaran telah berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi. Sebelumnya dia telah meminta pemerintah mempersiapkan sarana dan fasilitas mudik Lebaran agar pemudik merasa nyaman. Menurutnya pemerintah telah memberikan beragam kemudahan dalam persyaratan mudik tahun ini. Kemudahan tersebut dapat menjadi stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, melalui sektor pariwisata dan Usaha



DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh pihak, yang telah bekerja dengan dedikasi yang tinggi agar perjalanan mudik merayakan Idul Fitri pada tahun ini dapat berjalan dengan baik.

Dr. (HC) Puan Maharani
Ketua DPR RI



Saya rasa WFH atau hadir fisik itu tentunya kualitasnya akan sama. Yang membedakan adalah yang mudik dalam seminggu ke depan, apabila usulan Pak Kapolri disetujui, itu tentunya halal-bihalal dengan teman-teman kantor mundur seminggu, tapi efektivitasnya adalah kemacetan dapat diurai”

Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI



Dua hal saja yang penting, jaga prokes dan tetap nikmati perjalanan sambil perjalanan sambil istirahat. Tidak usah tegang-tegang, tapi nikmati dengan santai

Abdul Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR RI

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

Kemudahan yang dimaksudkan Puan adalah memperbolehkan anak-anak ikut mudik tanpa melakukan tes antigen atau *Polymerase Chain Reaction (PCR) test*, dengan catatan telah memperoleh vaksin dosis kedua. Sementara bagi orang dewasa yang telah mendapatkan vaksin ketiga atau *booster*, bebas melakukan perjalanan tanpa perlu tes antigen dan PCR.

“Tapi tentunya, mobilitas tinggi masyarakat harus dibarengi dengan ketatnya protokol kesehatan,” tegas Puan.

Sementara itu di lain pihak, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco

Ahmad telah memberikan dukungan kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home (WFH)* selama sepekan pasca Idul Fitri, bagi para pegawai pemerintah maupun swasta. Sebab, kebijakan WFH ini dinilai dapat mengurai kemacetan saat arus balik Lebaran 2022. Namun penerapan WFH terhadap pekerja tidak akan mempengaruhi produktivitas.

“Saya rasa WFH atau hadir fisik itu tentunya kualitasnya akan sama. Yang membedakan adalah yang mudik dalam seminggu ke depan, apabila usulan Pak Kapolri disetujui, itu tentunya halal-bihalal dengan teman-teman kantor mundur seminggu, tapi

efektivitasnya adalah kemacetan dapat diurai,” kata Dasco.

Di lain kesempatan, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar bahkan menyempatkan untuk melakukan pengecekan kesiapan arus mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1443 di *pool* armada transportasi daerah Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 April 2022.

Dia pun mengingatkan kepada pemudik agar tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19 selama dalam perjalanan. “Dua hal saja yang penting, jaga prokes dan tetap nikmati perjalanan sambil perjalanan sambil istirahat. Tidak usah tegang-tegang, tapi nikmati dengan santai,” ujar Muhaimin. ●eko/es

Perbaiki Fasilitas dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Kunci

Mudik telah terpatut dalam budaya masyarakat Indonesia. Fenomena mudik telah menciptakan pergerakan ritual tahunan secara besar dengan kecenderungan membeludaknya arus kendaraan dan manusia di jalanan keluar dari kota-kota besar, terutama megapolitan seperti Jabodetabek.



UNTUK memastikan pelaksanaan mudik lebaran 2022 berjalan lancar, Komisi V DPR RI berkepentingan melakukan pengawasan

kinerja para mitranya sebagai pelaksana teknis di lapangan atas kelancaran mudik tahun 2022.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, sudah dua tahun masyarakat Indonesia tidak mudik. Ketika pemerintah mengumumkan membolehkan mudik dengan beberapa persyaratan, hal itu langsung disambut masyarakat dengan sukacita.

Antusias mudik yang sangat tinggi di kalangan masyarakat harus bisa diantisipasi oleh pemerintah, dan hal

ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta *stakeholder* lainnya yang bermitra dengan Komisi V DPR RI. Harus ada persiapan dan pemetaan yang matang atas kendala-kendala yang mungkin saja dihadapi oleh para pemudik.

Selain dari sisi pemerintah sebagai pelaksana, Lasarus juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan mudik tahun 2022 ini untuk memperhatikan hal-hal kecil dengan detail. Seperti menjaga fisik dan kesehatan, memperhatikan kualitas kendaraan, dan selalu *update* terhadap kondisi jalan atau rute mudik yang akan dilalui.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan catatan terkait berjalannya mudik dan balik 2022.

Syahrul menyebut, masih banyak catatan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah atas penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini. Terkait apa saja yang harus dibenahi untuk arus mudik dan balik tahun mendatang, Syahrul meminta manajemen atau aturan-aturan mudik dibenahi dan tidak hanya melakukan kajian saja.

"Pertama harus dibenahi manajemennya, artinya pengaturannya. Kemenhub mengkaji harus benar-benar jangan hanya

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

FOTO: AFR/PDT





FOTO: AFR/PDT

“Pertama harus dibenahi manajemennya, artinya pengaturannya. Kemenhub mengkaji harus benar-benar jangan hanya berdasar catatan saja. Tapi dengarkan pemudik langsung”

Syahrul Aidi Maazat
Anggota Komisi V DPR RI

berdasar catatan saja. Tapi dengarkan pemudik langsung, survei. Jadi bukan hanya kajian atau berdasar laporan anak buah saja,” papar Syahrul.

Politisi PKS ini pun memberikan catatan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah atas penyelenggaraan mudik Lebaran tahun ini. “Masih banyak kecelakaan, yang memang bisa disebabkan faktor pemudik, tapi juga ada faktor fasilitas atau sarana prasarana yang tidak memadai atau belum aman,” ungkap Syahrul.

Dia pun menyangkan masih adanya beberapa titik kemacetan parah di tol-tol Jawa. Padahal, ia mengklaim Komisi V DPR selaku mitra kerja Kementerian Perhubungan telah mengingatkan potensi ledakan pemudik tahun ini.

“Ada kemacetan parah, seolah kita tidak pernah belajar dari dulu-dulu. Padahal Kemenhub sudah mencatat semua dari rapat, bahwa mudik tahun ini pasti akan meledak, karena sudah dua tahun tidak mudik. Harusnya kan diantisipasi,” tegas Syahrul.

Bahkan Syahrul menilai, pemerintah tidak belajar dari pengalaman kemacetan

mudik sebelumnya dan gagal mengantisipasi ledakan 80 juta pemudik. “Harusnya kan bisa diantisipasi, sudah diwanti-wanti sejak awal tapi terulang lagi,” ungkap legislator dapil Riau II itu.

Sementara itu, terkait klaim pemerintah bahwa mudik tahun ini berhasil, Syahrul menegaskan bahwa masih ditemukan beberapa masalah dalam mudik tahun ini. “Enggak sukses. Kalau sukses kenapa ada banyak kemacetan fatal di tol. Sukses itu kalau minim masalah, memang tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak macet, tapi kalau sampai 18 jam dari 2 jam lama perjalanan berarti kan tidak bisa dikatakan sukses. Juga gagalantisipasi lonjakan pemudik, padahal sudah diingatkan terus,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho beranggapan bahwa kunci kesuksesan arus balik lebaran 2022 itu ada pada rekayasa lalu lintas. Maka itu, menurutnya kedepan sebagaiantisipasi, pemerintah harus menyiapkan transportasi publik yang layak dan nyaman untuk mengurangi

penggunaan mobil pribadi saat arus mudik atau balik.

Bahkan ia mengatakan, kebijakan perpanjangan libur sekolah bukan pilihan tepat untuk mengurai kemacetan arus balik. Politikus fraksi Partai Demokrat ini mengakui kemacetan acap terjadi di ruas tol Trans Jawa dan pelabuhan Merak. “Begitu pun dengan luar pulau Jawa,” kata Irwan.

Rata-rata penyebab kemacetan di sejumlah titik tol maupun jalur arteri terjadi karena tingginya animo pemudik menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun demikian, Irwan mengapresiasi pelayanan dari Kementerian Perhubungan, Polri, dan TNI kepada masyarakat yang mudik dan arus balik lebaran 2022.

“Terima kasih kepada Menhub, TNI, Polri, khususnya Korlantas dan lainnya yang memberikan pelayanan luar biasa kepada masyarakat Indonesia,” ungkap Legislator dapil Kalimantan Timur ini.

Sebagai catatan dan evaluasi mudik tahun 2022 hendaknya terus disempurnakan agar penyelenggaraan kegiatan di setiap hari raya Idulfitri ini selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Pemerintah diminta terus memperbaiki dan mengevaluasi manajemen rekayasa lalu lintas mulai dari manajemen ganjil genap, *one way*, *contraflow* di jalan tol maupun di jalan non-tol sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan.

Soal pelabuhan penyeberangan harus ada perluasan kapasitas penampungan kendaraan menuju pelabuhan penyeberangan, waktu antre kendaraan untuk naik angkutan penyeberangan harus bisa dipangkas. Jalan non-tol di jalur selatan perlu dilihat lagi secara lebih detail dalam segi sarana dan prasarana. Semisal SPBU, penerangan jalan hingga *rest area*. Perbaiki berbagai fasilitas yang ada di bandara, pelabuhan, terminal maupun stasiun menjadi tanggung jawab pemerintah. ●eko/es

Manfaatkan Teknologi untuk Atur Lalu Lintas

Mobilitas pengguna moda transportasi darat hingga di bandara saat arus mudik dan arus balik lebaran 2022 mengalami lonjakan yang signifikan. PT Jasa Marga mencatat 1,7 juta kendaraan keluar Jabodetabek sejak H-10 sampai H-1 Lebaran atau naik 9,5 persen dibanding saat masa mudik sebelum pandemi tahun 2019 lalu.



CATATAN

lainnya, terdapat sekitar 150 ribu penumpang pesawat via Bandara Soekarno-Hatta dalam sehari yaitu pada

Minggu (8/5/2022) yang merupakan angka terbesar selama era pandemi. Sementara secara keseluruhan dari berbagai wilayah Indonesia, menurut Survei Data Balitbang Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik 2022 diprediksi mencapai 85,5 juta orang.

Tanpa kerja keras berbagai masing-masing *stakeholder* pemerintah dalam mengatur dan rekayasa lalu lintas, tidak mungkin pergerakan 85,5 juta pemudik yang menggunakan berbagai moda transportasi tersebut bisa berjalan

aman, lancar, dan terkendali. Berbagai langkah antisipasi kemacetan pun telah diberlakukan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan 7 cara mencegah kepadatan tersebut diantaranya sistem satu arah, manajemen sistem di *rest area* (RAMS) hingga menyiapkan rute alternatif.

Polri bersama Kementerian Perhubungan terus-menerus menyosialisasikan rute alternatif menuju Bandung dari Jakarta saat penerapan *one way*. Ketertiban masyarakat juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam mendukung penanganan dan kelancaran arus mudik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, kebijakan

yang diambil Polri tersebut sebagai langkah tepat sasaran nan presisi dalam membuat arus mudik dan arus balik berjalan kondusif. Polri juga dinilai telah berhasil dalam kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dalam menunjang strategi yang antisipatif sehingga dalam arus mudik Lebaran 2022.

Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan mudik bisa ditekan turun sebesar 31 persen jika dibandingkan musim mudik dan balik Lebaran 2019 periode sebelum pandemi Covid-19.

Bukan tanpa alasan, jika apresiasi disematkan terhadap kinerja Polri dalam mengawal mudik Lebaran 2022. Polri berhasil ujung tombak dalam mengantisipasi potensi kemacetan panjang, sehingga arus mudik kali ini



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni

lebih lancar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tantangan pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 relatif lebih sulit mengingat antusiasme masyarakat yang memuncak imbas dua tahun tidak mudik ke kampung halaman.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terjadi *deadlock* lalu lintas karena meningkatnya *volume* penggunaan pribadi di jalan-jalan bebas hambatan. Namun, semua kekhawatiran berhasil diantisipasi oleh Polri bersama lembaga terkait yang berwenang. Strategi yang diterapkan oleh Polri berjalan sukses, seperti sistem satu arah atau *one way*, ganjil-genap, *contra flow*.

Tak dapat dipungkiri masih ada sedikit kemacetan di beberapa titik, akan tetapi secara umum layanan arus mudik dan balik lebaran berjalan dengan baik. Polri di lapangan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja kepolisian dalam penanganan mudik lebaran 2022 memiliki peranan signifikan dalam menciptakan kelancaran lalu lintas saat mudik tahun ini. 77,5 persen responden menilai Polri memiliki peranan signifikan dalam kelancaran mudik Lebaran 2022.

"Masyarakat betul-betul merasakan kehadiran Polri. Untuk itu, saya apresiasi kerja keras Kapolri beserta jajaran karena sudah memikirkan mitigasi risiko mudik tahun ini hingga sukses dan berjalan dengan baik," ujar Sahroni.

Pemanfaatan Teknologi Optimal

Terdapat dua kunci manajemen arus lalu lintas mudik tahun ini. Pertama adalah penggunaan teknologi terkini dalam bidang *road transportation*, sebagai *decision support system*. Teknologi ini

"Masyarakat betul-betul merasakan kehadiran Polri. Untuk itu, saya apresiasi kerja keras Kapolri beserta jajaran karena sudah memikirkan mitigasi risiko mudik tahun ini hingga sukses dan berjalan dengan baik"

Ahmad Sahroni
Wakil Ketua Komisi III

mendukung keputusan pimpinan puncak di Korlantas Polri dan Jasa Marga dalam memutuskan penanganan volume lalu lintas yang jumlahnya luar biasa.

Kelancaran arus mudik kali ini juga dinilai karena pihak kepolisian mampu memanfaatkan teknologi dan transformasi digital dengan optimal. Hal ini terbukti dengan informasi akurat yang diberikan polri seputar kondisi tol hingga memantau kepadatan melalui CCTV sehingga menjadi salah satu kunci penting di balik suksesnya mudik tahun 2022 ini.

Selain itu, koordinasi lintas sektoral yang sangat intensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif. Koordinasi dilakukan khususnya Polri sebagai pemegang diskresi semua rekayasa lalu lintas dengan pemangku kepentingan lain seperti Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol. Bahkan dengan dinas-dinas Provinsi, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan.

Koordinasi pada level pengambil kebijakan, didukung lagi dengan konsep Intelligent Transportation System (ITS) yang dimiliki Jasa Marga, di Jasa Marga Tollroad Command Centre (JMTC). JMTC sebagai mengumpulkan seluruh informasi lalu lintas jalan tol melalui beberapa sumber, seperti pantauan 1.913 CCTV, 26 speed camera, 39 CCTV, *analytic traffic counting*, 19 Remote Traffic Microwave Sensor, 7 Weigh in Motion dan juga informasi dari laporan petugas di lapangan serta informasi dari pelanggan melalui call center 14080.

Dalam penanganan arus mudik lebaran, penggunaan JMTC membantu dengan menginformasikan secara real time jika kapasitas lajur atau kapasitas gerbang sudah terpenuhi 60 persen dari kapasitas terpasang. Maka, akan diambil keputusan oleh Korlantas Polri sebagai pemegang diskresi untuk melakukan rekayasa lalu lintas.

Mengingat untuk rekayasa lalu lintas *one way*, dibutuhkan waktu dua jam untuk melakukan *clearance* di jalur yang akan dilakukan *one way* agar keamanan dan keselamatan pengguna jalan terjaga. Saat dilakukan *clearance*, kapasitas terus naik sehingga saat kedatangan lalu lintas mencapai puncaknya. Di lapangan, penambahan kapasitas melalui *one way* atau *contra flow* sudah digelar dan siap digunakan.

"Selama berlangsungnya arus mudik Lebaran 2022 ini, Polri selalu memberikan informasi akurat dengan cepat seputar kondisi tol, peta jalan hingga memantau kepadatan melalui CCTV. Sehingga, dengan demikian mampu memperkirakan berapa personil yang perlu diturunkan dalam suatu titik wilayah. Saya harap kesuksesan mudik kali ini bisa terus meningkat di tahun-tahun yang akan datang," pungkas Sahroni. ● pun/es

Apresiasi Keterlibatan BUMN

Sedia payung sebelum hujan. Pepatah tersebut jadi pegangan pemerintah dan BUMN untuk bersinergi hadapi tantangan arus mudik dan arus balik Lebaran Tahun 2022.



ANTUSIASME

mudik yang tinggi pasca Pandemi Covid-19 sangat tinggi. Meskipun dengan sejumlah catatan, Komisi

IV DPR RI mengapresiasi segala daya dan upaya demi terwujudnya mudik yang aman, nyaman, sekaligus lancar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Martin Manurung mengapresiasi penanganan arus mudik dan arus balik selama Lebaran Tahun 2022. Meskipun terdapat catatan yang perlu dievaluasi kembali, baginya, setiap BUMN yang terlibat telah memberikan kontribusi dengan sebaik-baiknya.

"Kalau saya lihat secara umum, cukup baik. Memang perlu diakui terjadi kendala, cuma kalau kita melihat dari melonjaknya (jumlah kendaraan) arus mudik pasca pandemi Covid-19 yang selama dua tahun ini. Kita berharap ini menjadi catatan dan menjadi masukan agar bisa mengantisipasi ke depan," ungkap Martin kepada **Parlementaria**.

Dirinya mengungkapkan, jika diberikan skala nilai dari angka 1 sampai 10, maka 7,5 menjadi nilai kerja BUMN. Baginya, angka ini menandakan pemerintah maupun

stakeholder terkait tidak berpuas diri untuk *memecat* diri bekerja lebih baik pada tahun mendatang. Lebih lanjut, terangnya, Komisi VI DPR RI akan melaksanakan rapat evaluasi bersama pada masa persidangan ini.

Perlu diketahui, pada 23 Maret 2022 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan pelonggaran mobilitas jelang Idul Fitri. Sehingga masyarakat Indonesia diizinkan untuk mudik, dengan sejumlah syarat seperti vaksinasi lengkap dan booster sekaligus menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan ini,

Tentu, BUMN tidak terkecuali mulai dari, PT KAI, PT Jasa Marga, dan PT Pelni, PT ASDP Ferry, PT Utama Karya, PT Angkasa Pura, dan lainnya turut terlibat. Masing-masing BUMN menerapkan berbagai skema antisipasi demi memberikan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan yang optimal bagi para pemudik. Tingginya antusiasme mudik tahun 2022 ini tidak mampu terbendung.

Berdasarkan informasi yang diterima, jumlah pemudik tahun 2022 sebanyak 85,5 juta orang, berkali lipat



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung

kemudian, ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Satgas Penanganan Covid-19, beserta unsur lainnya.

dibanding jumlah pemudik tahun 2019. Tercatat, ada 6,3 juta pemudik yang menggunakan transportasi umum, sisanya menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian, sebanyak

2.690.458 kendaraan melintasi seluruh ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Dari Bakauheni ke Merak, pergerakan kendaraan mencapai lebih dari 37 ribu dalam sehari. Sementara, untuk jalur tol Semarang ke Jakarta mencapai 170 ribu lebih kendaraan. Sekitar 570 penerbangan dengan mengangkut 3.500 orang per jamnya. Rangkaian angka-angka tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang pengelolaan arus mudik yang terjadi di Indonesia.

Mewakili pemerintah, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi arus mudik dan dan arus balik berjalan dengan sukses. Kesuksesan ini terjadi karena BUMN terkait mengerahkan kekuatan untuk ikut membantu kelancaran arus mudik dan dan arus balik. Baginya, kesuksesan mudik tahun ini menjadi bukti bagi pemerintah dan transparan dan profesional.

Ia menyampaikan sebagai kementerian yang membawahi perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN kerap mendapatkan penugasan yang cukup vital bagi masyarakat seperti arus mudik dan balik lebaran ini. "Kita sinergikan bagaimana kekuatan BUMN untuk mudik karena memang terjadi, mau itu pesawat, bandara, kapal, pelabuhan, penyeberangan beserta kapalnya, jalan tol, BBM-nya dan sebagainya. Dan terbukti kita bisa, ini yang mau saya namakan sinergi BUMN yang sehat. Bukan malah sinergi BUMN yang menutup diri dan juga menjadi menara gading. Ini yang kita tekankan," pungkas Erick Thohir.

Sinergi BUMN

Turut membidangi pengawasan kinerja BUMN, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi kinerja BUMN yang terlibat melayani selama mudik Lebaran 2022. Satu di antaranya, antisipasi PT Utama Karya dalam mengelola kemacetan di sepanjang jalan Tol



Kami menerima informasi dari Jasa Marga. Saya mengapresiasi usaha Jasa Marga memastikan kelancaran arus mudik Lebaran. Meski sempat terjadi kepadatan kendaraan di puncak arus mudik, tapi itu bisa segera terurai berkat koordinasi yang baik dalam merekayasa lalu lintas.

Andre Rosiade
Anggota Komisi VI DPR RI

Trans Sumatera (JTTS). Ia menilai, pelaksanaan pengelolaan trafik telah sesuai dengan strategi yang telah dipersiapkan.

"Kami mengapresiasi kesuksesan Utama Karya dalam mengelola lalu lintas selama momen Mudik Lebaran 2022 di JTTS. Dengan angka lalu lintas yang meningkat hingga 3 kali lipat namun tidak menimbulkan kemacetan yang berarti. Ini menandakan keberhasilan penerapan strategi dan prediksi antisipasi yang disusun oleh Utama Karya," ungkap Andre.

Tidak hanya itu, ia mengapresiasi kinerja PT KAI yang mendukung kenyamanan dan keamanan para pemudik yang menggunakan moda kereta api jarak jauh. Dirinya

memperhatikan selama arus mudik dan arus balik lebaran 2022 ini tidak ada keluhan besar yang dirasakan oleh pengguna layanan kereta api.

Bahkan, layanan stasiun berupaya menjamin keamanan penumpang sekaligus kualitas kereta dengan baik. Sebelumnya PT KAI menargetkan menampung sekitar 2,4 juta orang pemudik, dan target tersebut hampir tercapai pada lebaran 2022 ini. Tentu saja kenaikan jumlah penumpang yang cukup drastis meningkatkan pemasukan bagi PT KAI.

Terakhir, Andre turut mengapresiasi kinerja PT Jasa Marga sebagai BUMN penyelenggara jalan tol yang memberikan layanan terbaik baik dengan moda transportasi publik maupun transportasi pribadi. Menurutnya, dengan menggunakan jalur darat, khususnya jalan tol Trans Jawa tahun ini relatif berjalan lancar berkat kesiapan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami menerima informasi dari Jasa Marga. Saya mengapresiasi usaha Jasa Marga memastikan kelancaran arus mudik Lebaran. Meski sempat terjadi kepadatan kendaraan di puncak arus mudik, tapi itu bisa segera terurai berkat koordinasi yang baik dalam merekayasa lalu lintas," tutupnya. ●ts/es



Oleh: Ki Darmaningtyas

Ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi)
di Jakarta

Evaluasi Angkutan Mudik Lebaran 2022

Penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2022 dapat dikatakan berhasil, meski di sana-sini ada kekurangannya. Namun secara umum dapat dikatakan berhasil karena sedikit ditemukan kasus kemanusiaan yang menonjol terkait dengan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran.

Memang muncul kasus seperti pemblokiran jalan tol oleh pengguna jalan tol dari arah Bandung atau ketersendatan arus penyeberangan Merak-Bakaheuni, tapi semua dapat teratasi secara cepat. Indikator keberhasilan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2022 dapat dilihat dari kelancaran lalu lintas arus mudik dan balik, ketertiban dalam bertransportasi (terutama bagi sepeda motor), dan menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas, terutama yang membawa korban jiwa meninggal dunia.

Ukuran kelancaran dalam arus mudik ini memang tidak sama dengan kondisi normal, mengingat menurut PT. Jasa Marga sebagai salah satu operator jalan tol, volume kendaraan pribadi yang melintas melalui ruas tol selama masa mudik Lebaran meningkat sampai 40 persen lebih. Bila volume kendaraan meningkat sampai 40 persen, maka sangat tidak rasional bila menghendaki arus lalu lintas lancar seperti dalam kondisi normal. Namun kalau tidak sampai terjadi stagnasi, itu sudah dapat dikatakan lancar.



Berdasarkan pengalaman pribadi, kemacetan itu justru terjadi di tengah kota. Sebagai contoh, perjalanan dari Terminal Mangkang di Semarang ke Terminal Tirtonadi (29/4) misalnya yang total mencapai empat jam, namun kemacetan justru terjadi di tengah kota, terutama dari Terminal Mangkang sampai ke Jatingaleh yang memerlukan waktu tempuh satu jam tersendiri.

Demikian pula perjalanan dari Yogya menuju ke Semarang (6/5), Yogya-Banyumanik dapat ditempuh dalam waktu 3,5 jam, tapi ketika masuk ke Kota Semarang, dari Banyumanik ke Stasiun Tawang saja memerlukan waktu 1,5 jam. Saat naik KA Semarang-Jakarta (7/5) di jalur yang kanan/kirinya terlihat jalan tol maupun arteri (Pantura), kendaraan arah barat (Jakarta) maupun timur terlihat lancar. Kendaraan ke arah timur di jalan Pantura didominasi oleh kendaraan pribadi, sedangkan arah barat didominasi oleh pemudik sepeda motor, tapi jumlahnya juga tidak sebanyak tahun-tahun lalu.

Dari aspek ketertiban, arus mudik tahun 2022 ini juga jauh lebih tertib, terutama bagi pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Selain volume pemudik dengan menggunakan motor menurun dibandingkan dengan tahun 2019, perilaku yang kurang tertib para pemudik sepeda motor seperti membawa beban yang melebihi kapasitas sehingga mengganggu kenyamanan dan mengancam keselamatan dalam berkendara, juga turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Bila tahun-tahun sebelumnya para pemudik sepeda motor sering membawa beban melebihi kapasitas, termasuk memasang papan atau bambu di jok belakang agar dapat membawa barang lebih banyak, tahun ini kondisi tersebut jarang ditemukan. Memang masih ada di sana sini, tapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Tertibnya

Dari aspek ketertiban, arus mudik tahun 2022 ini juga jauh lebih tertib, terutama bagi pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Selain volume pemudik dengan menggunakan motor menurun dibandingkan dengan tahun 2019, perilaku yang kurang tertib para pemudik sepeda motor seperti membawa beban yang melebihi kapasitas sehingga mengganggu kenyamanan dan mengancam keselamatan dalam berkendara, juga turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

pemudik motor itu diperkirakan berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan.

Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas selama masa Mudik Lebaran 2022 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka kecelakaan arus mudik Lebaran 2019 lalu. Menurut Dirut PT Jasa Raharja Rivan Purwantono, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan sampai H+3 menurun sampai 49 persen dibandingkan dengan angka korban meninggal dunia pada arus mudik Lebaran 2019 (sebelum pandemi).

Tentu ini kabar yang menggembirakan karena volume kendaraan yang melakukan pergerakan meningkat sampai 40 persen lebih namun angka kematian yang dipicu oleh kecelakaan lalu lintas menurun. Menurunnya jumlah korban laka lantas pada musim mudik Lebaran 2022 ini juga merupakan

bukti meningkatnya ketertiban para pemudik dalam mematuhi rambu lalu lintas. Sebab sering dikemukakan oleh pihak kepolisian bahwa kecelakaan selalu diawali dengan pelanggaran.

Salah satu upaya untuk mengurai persoalan angkutan mudik tersebut adalah dengan menyediakan angkutan Mudik Gratis. Mengacu pada paparan PT Jasa Raharja, program mudik gratis dengan tema Mudik Sehat Mudik Aman tahun ini dilaksanakan oleh 26 BUMN dan mampu mengangkut 39.755 pemudik. Program ini tentu di luar program mudik bareng yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah bahkan tidak hanya memfasilitasi arus mudik saja, tapi juga arus balik yang pemberangkatannya dilepas oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Terminal Mangkang Semarang, 7 Mei 2022.

Untuk moda lain, seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut dapat dikatakan aman-aman saja. Problem besar bagi para pemudik yang menggunakan pesawat terbang adalah harga tiket yang tinggi dan terbatasnya jumlah maskapai akibat perusahaan seperti PT Garuda Indonesia hanya mempunyai jumlah pesawat yang terbatas.

Berdasarkan catatan di atas, kita patut mengapresiasi kinerja Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, PT Jasa Raharja Persero, dan para stakeholder lain yang telah sukses menyelenggarakan angkutan mudik Lebaran 2022. Juga kepada Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan yang telah melakukan survei sejak awal mengenai potensi mudik pada Lebaran 2022 sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perencanaan bagi Pemerintah dalam menyelenggarakan angkutan Lebaran 2022. ●

Meski Pandemi, Pelayanan Haji Harus Maksimal

Pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah Indonesia. Namun, Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M sangatlah berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah jemaah, kondisi di Arab Saudi dan kebijakan lainnya.

tahun-tahun mendatang, oleh karenanya untuk mendukung hal tersebut, Komisi VIII DPR RI pada masa persidangan yang lalu, tepatnya tanggal 13 April 2022 telah melakukan pembahasan dengan Menteri Agama RI terkait penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya yaitu penetapan Biaya

Tahun ini, jumlah jemaah haji yang diberangkatkan sebanyak 100.051 jemaah yang terbagi ke dalam kuota haji reguler sebanyak 92.825 jemaah, 7.226 jemaah haji khusus dan petugas haji sebanyak 1.901 orang.

Melihat banyak pembatasan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memahami, tugas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sangat berat. Namun, DPR bersama Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dan memastikan pelaksanaan berjalan dengan baik.

"Setelah dua tahun berturut-turut Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji, maka tahun ini merupakan tahun krusial, harus menjadi tonggak keberhasilan kita untuk menyakinkan kepada negara-negara lain, terutama kepada Arab Saudi, bahwa Indonesia mampu dan berhasil dalam membina, melayani dan melindungi para jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," kata baru-baru ini.

Keberhasilan kita pada tahun ini, lanjut Marwan akan sangat menentukan terhadap penyelenggaraan ibadah haji



Marwan Dasopang,
Wakil Ketua Komisi VIII
DPR RI

JAWA/PDT

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.

Dari hasil pembahasan DPR RI dan Menteri Agama tersebut disepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) rata-rata sebesar Rp39.886.009 per jemaah dan biaya yang berasal dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata sebesar Rp41.861.835 per jemaah. Dengannya, total biaya haji secara ekonomis adalah rata-rata Rp81.747.844 per jemaah. Jemaah hanya membayar biaya perjalanan saja atau 48,7 persen dari total biaya, selebihnya berasal dari dana nilai manfaat hasil investasi keuangan haji.

Bagi jemaah lunas tunda di tahun ini, walaupun ada kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) jemaah tidak membayar lagi sisa kekurangannya. Kekurangan biayanya berasal dari dana *Virtual Account* atau nilai manfaat keuangan haji lagi sebagai imbal hasil dari aktivitas investasi dana setoran awal dan setoran lunas dari BPKH.

Selain itu, lanjut legislator F- PKB itu, Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyepakati untuk memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji tahun 1443 H/2022M dengan melakukan peningkatan volume makan jemaah haji di Makkah dan Madinah dari 2 (dua) kali per hari menjadi 3 (tiga) kali per hari, sehingga jumlah makan di Makkah menjadi 75 kali yang pada tahun sebelumnya sebanyak 50 kali, dan makan di Madinah sebanyak 27 kali yang tahun sebelumnya sebanyak 18 kali.

"Ini merupakan kebijakan peningkatan pelayanan yang wajib disampaikan kepada para calon Jemaah haji di daerah," jelasnya.

Kebijakan lain dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah adanya Asuransi *Full Coverage* untuk para calon jemaah, tidak hanya asuransi jiwa seperti pada tahun-tahun sebelumnya tetapi juga asuransi Kesehatan selama di Arab Saudi, terutama jika calon jemaah mengalami positif Covid-19 akan

tercover oleh asuransi Kesehatan tersebut.

Di samping peningkatan pelayanan tersebut, mulai tahun ini akan ada program manasik haji sepanjang tahun. Manasik haji yang umumnya hanya pada saat menjelang keberangkatan calon jemaah bagi jemaah yang berhak berangkat, mulai tahun ini manasik juga akan diadakan kepada calon jemaah haji tunggu untuk penguasaan materi ibadah haji sesuai tujuan utama berhaji adalah untuk terlaksananya ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Biaya untuk kegiatan manasik haji sepanjang tahun berasal dari biaya nilai manfaat keuangan haji sebesar Rp30,26 miliar.

Penambahan Biaya Tak Dibebankan Pada Jemaah

Dalam perjalanannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan tambahan anggaran untuk operasional haji senilai Rp1,5 triliun. Penambahan anggaran itu

“Setelah dua tahun berturut-turut Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji, maka tahun ini merupakan tahun krusial, harus menjadi tonggak keberhasilan kita untuk menyakinkan kepada negara-negara lain, terutama kepada Arab Saudi,...

Marwan Dasopang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

diajukan karena tambahan kebutuhan biaya haji 2022.

Penambahan anggaran tersebut terdiri dari biaya masya'ir haji reguler sebesar Rp1,4 triliun. Penambahan biaya juga pada biaya masyair Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebesar Rp9 miliar.

Adapun yang dimaksud dengan biaya masyair adalah biaya prosesi ibadah haji yang harus dibayarkan ketika jemaah haji berada di Mina, Arafah dan Muzdalifah.

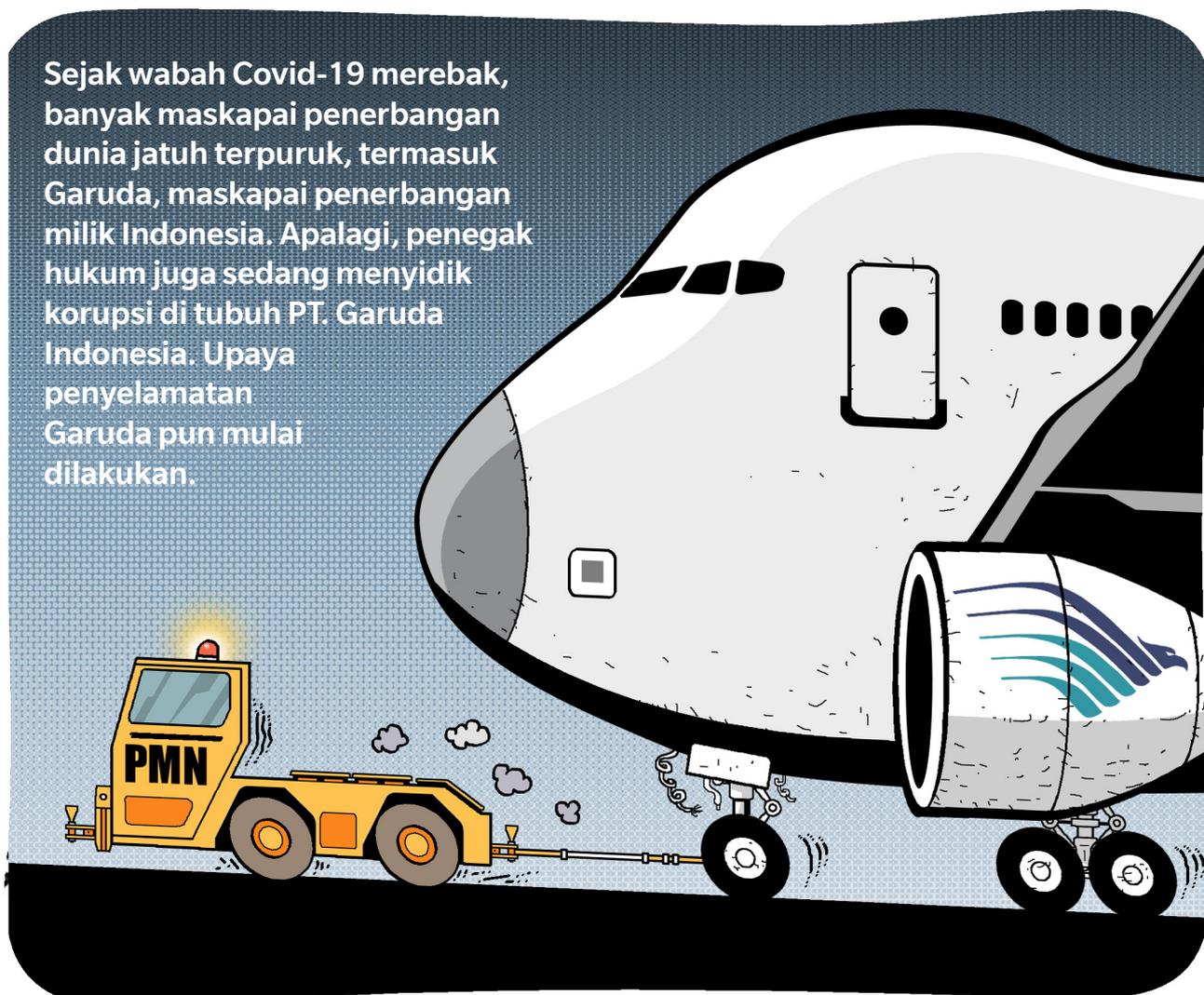
Menjawab polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memastikan bahwa calon jemaah haji tidak akan terbebani dengan penambahan tersebut. Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama dan BPKH, disepakati untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang diusulkan Kemenag sebesar Rp1,5 triliun yang berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH dan dana efisiensi dana haji sebelumnya.

"Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama dan BPKH menyepakati tidak ada pembebanan terhadap calon jemaah haji atas tambahan biaya yang disepakati. Apa yang disampaikan dalam pembahasan, komitmen dari BPKH jelas bahwa setengah dari kebutuhan Rp1,5 triliun tersebut akan di-cover oleh nilai manfaat dan sisanya itu berasal dari dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 sampai 2019," terang Ace.

Pada prinsipnya, tambah Ace, selama BPKH bisa mempertanggungjawabkan penggunaan nilai manfaat tersebut dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, tentu pasti akan disetujui. Terutama untuk memastikan soal legalitas atau rujukan hukum atas penggunaan dana efisiensi yang berasal dari penyelenggaraan haji tahun sebelumnya yang seharusnya itu masuk dalam dana kelolaan BPKH. ● rnm/es

Selamatkan Garuda dengan PMN

Sejak wabah Covid-19 merebak, banyak maskapai penerbangan dunia jatuh terpuruk, termasuk Garuda, maskapai penerbangan milik Indonesia. Apalagi, penegak hukum juga sedang menyidik korupsi di tubuh PT. Garuda Indonesia. Upaya penyelamatan Garuda pun mulai dilakukan.



Sejak Februari 2022, Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda. Secara intensif rapat Panja terus digelar untuk merumuskan rekomendasi jitu yang mampu menyelamatkan Garuda dari ancaman kebangkrutan. Salah satu upaya penyelamatannya adalah dengan menggelontorkan

Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada April lalu, angka PMN untuk Garuda disepakati Rp7,5 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menjelaskan, bantuan PMN untuk Garuda bisa segera dicairkan bila Garuda telah mencapai kesepakatan dengan krediturnya berupa penundaan pembayaran utang. Menteri BUMN dan Dirut PT. Garuda sudah sering dipanggil ke Komisi VI DPR untuk

membincang serius soal *planing* penyelamatan Garuda.

"PMN tersebut berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," kata Martin, April lalu. Voting proses PKPU akan berlangsung 17 Mei 2022 dan akan dibacakan secara



01/PDT

PMN tersebut berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Martin Manurung
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

terbuka tiga hari kemudian. Kinerja keuangan Garuda jadi keniscayaan untuk segera dibenahi, memang. Selain itu, negosiasi ulang utang Garuda juga perlu terus diawasi.

Komisi VI telah menyisir satu per satu persoalan yang membelit maskapai pelat merah tersebut. Opsi-opsi penyelamatan pun dibebaskan. Yang krusial memang kinerja keuangan Garuda. Utang telah membelit keuangan Garuda hingga terpuruk. Komisi VI pun telah memberi *warning* soal ini. Dan yang lebih penting lagi, dana PMN tidak boleh digunakan Garuda untuk membayar utang. Itu poin penting yang selalu ditegaskan kepada Dirut Garuda Irfan Setiwaputra.

Dirut Garuda sendiri merespon positif. Di hadapan rapat Komisi VI, ia menjamin suntikan PMN tersebut tidak akan dipakai untuk membayar utang. Dana PMN sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk membiayai operasional perusahaan, seperti mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang sebelumnya tidak dioperasikan.

Akhir April lalu, Komisi VI telah menyelesaikan rapat-rapat Panja Penyelamatan Garuda. Martin membacakan poin-poin penting

rekomendasi untuk Garuda. Salah satunya adalah Kementerian BUMN dan PT. Garuda Indonesia agar konsisten melaksanakan implementasi rencana bisnis (*business plan*) yang telah disepakati. "Yaitu, meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa pesawat, dan peningkatan pendapatan kargo, dan produk turunan lainnya (*ancillary*)," papar Martin.

Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, Komisi VI berkepentingan mengawasi implementasi *business plan*. Apabila ada rencana perubahan *business plan*, Kementerian BUMN dan Dirut Garuda didesak untuk melapor kepada Komisi VI DPR RI. Perlu pembahasan lagi bila Kementerian BUMN dan Garuda ingin mengubah perencanaan bisnis yang telah disepakati dengan Komisi VI.

Dirut Garuda pernah memaparkan proposal *new business plan*. Ada tiga prinsip bisnis yang coba ingin dikembangkan Garuda, yaitu *simple*, *profitable*, dan *full service*. Tiga prinsip tersebut direalisasikan ke dalam empat strategi. *Pertama*, mengoptimalkan *route network*,

sehingga Garuda hanya akan mengoperasikan rute-rute penerbangan yang menguntungkan (*profitable*).

Dalam pemilihan rute ini, fokus Garuda tertuju pada rute-rute penerbangan domestik, serta rute-rute internasional tertentu yang juga mempertimbangkan penerbangan kargo. *Kedua*, menyesuaikan jumlah pesawat Garuda dan Citilink agar selaras dengan *route network* yang telah dioptimalkan. Hal ini dilakukan berbarengan dengan simplifikasi tipe pesawat untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi operasional.

Ketiga, dalam *New Garuda Business Plan* termuat juga renegotiasi kontrak sewa pesawat dengan mengupayakan skema berbasis *variable cost*. Sedangkan, strategi keempat adalah meningkatkan kontribusi pendapatan kargo melalui optimalisasi *belly capacity* dan digitalisasi operasional. Pada bagian lain, Martin mengemukakan, isi rekomendasi Komisi VI DPR selanjutnya, program privatisasi berupa konversi utang menjadi saham dan masuknya tambahan modal.

"Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan, selama kepemilikan negara minimal 51 persen," ujarnya.

Komposisi saham PT. Garuda Indonesia (Persero) per September 2021 dimiliki oleh tiga komponen, yaitu Pemerintah RI (60,54 persen), PT. Trans Airways (28,26 persen), dan masyarakat (11,2 persen). Jika ada investor strategis yang berminat terhadap pembelian saham tersebut, maka Kementerian BUMN dan PT. Garuda Indonesia diminta untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI. ●mh/es

RUU Penanggulangan Bencana: Tak Ada Titik Temu

Sejak disetujui dalam Rapat Baleg menjadi RUU usul inisiatif DPR pada Juli 2019, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terus mengalami dinamika pembahasan. Terkini, RUU yang diharapkan menjadi suluh atas penanganan bencana di Indonesia, resmi disetop pembahasannya karena tidak ada titik temu antara DPR RI dengan pemerintah.

Jika ditilik dari Naskah Akademiknya, RUU ini adalah implementasi penjabaran dari tujuan bernegara, yaitu Melindungi Segenap Bangsa Indonesia. Perlindungan yang diatur dalam RUU ini selaras dengan posisi Indonesia yang ditinjau dari sisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terjadi bencana dengan frekuensi cukup tinggi. Sehingga, diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari sisi urgensitas, Indonesia rentan dengan potensi



bencana, baik bencana alam maupun non-alam, UU Penanggulangan Bencana yang eksis saat ini dinilai masih belum memadai untuk menanggulangi beberapa kategori bencana. Belum memadai dari sisi sosial penanganan bencana maupun dari sisi *road map* atau mitigasi pencegahan bencana.

Dari sisi sosial, banyak persoalan yang muncul setelah kejadian bencana, misalnya kemiskinan, keamanan, hingga ketahanan keluarga. Karena itu, koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan kementerian teknis dalam menangani persoalan bencana perlu diperkuat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, pemerintah menginginkan penganggaran kebencanaan, baik yang bersifat pencegahan maupun edukasi terhadap bencana, disebar ke beberapa kementerian/lembaga. Namun, untuk penanganan saat terjadi bencana, pemerintah inginkan adanya institusi non permanen bersifat *task force*.

Komisi VIII akan terus mempertahankan bahkan jika perlu diperkuat institusi kelembagaan tersebut (BNPB). Bahkan, jika diperlukan badan kebencanaan, dalam draf usulan Komisi VIII, mempunyai wewenang untuk

koordinasi sampai ke tingkat daerah.

"Apakah itu akan ada badan daerah yang berada di dinas-dinas itu, tetapi ada pasal rentang kendalanya. Dia bisa memerintah dinas-dinas yang berkaitan dengan penanggulangan bencana," ujar Marwan.

Politisi PKB ini tidak mempermasalahkan jika RUU ini terus *mandeg* akan dilanjutkan pada DPR RI periode selanjutnya. *Toh*, keberadaan BNPB sejauh ini masih dapat menggunakan UU yang lama. Bahkan, jika RUU ini kelak disahkan sebagaimana keinginan dari Komisi VIII, maka BNPB akan memiliki kekuatan rentang kendali ke daerah dalam penanganan bencana di level dinas. Termasuk, memperjelas mana yang termasuk kategori bencana atau bukan.

"Saat ini di berbagai pasal disebutkan rob bukan bencana. Tetapi, jika rob itu sudah makan korban itu termasuk bencana. Jadi sementara ini kita setop dulu pembahasan sampai pemerintah mau menurunkan egonya," ujar Marwan.

Resmi disetop

Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 resmi memutuskan untuk menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Kesepakatan ini diambil usai Pimpinan Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Pada rapat kerja yang dilaksanakan pada 13 April 2022, diambil kesimpulan bahwa Komisi VIII DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana pada tingkat I. Karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)," jelas

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Dalam pembahasan RUU penanggulangan bencana itu terdapat perbedaan tentang rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB. DPR RI, mengajukan untuk BNPB disebutkan secara eksplisit pada bab kelembagaan sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini untuk memperkuat BNPB diantaranya melalui anggaran, kelembagaan, dan koordinasi. Sementara DIM yang diajukan oleh pemerintah bab kelembagaan

sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sesuai Pasal 107 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU dan Pasal 162 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

"Karena itu kami mengusulkan di forum yang terhormat ini dan mohon persetujuannya untuk memutuskan penghentian



JKA/PDPT

Pada rapat kerja yang dilaksanakan pada 13 April 2022, diambil kesimpulan bahwa Komisi VIII DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana pada tingkat I.

Yandri Susanto
Ketua Komisi VIII DPR RI

hanya diisi dengan kata-kata badan, untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.

"Akibat perdebatan mengenai kelembagaan ini, rapat panja diskors beberapa kali dan *lobby* dengan Menteri sosial, selaku pemegang Surat Presiden (Supres) mengenai rancangan undang-undang penanggulangan bencana juga

pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana sebagaimana telah diputuskan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dan memberikan kesempatan pada Komisi VIII DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang lainnya yang sesuai dengan bidang tugas lainnya," tutup Yandri. • rdn/es



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meresmikan penataan Kawasan Gunung Kemukus yang berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Rabu (27/4/2022). Foto: Eno/Man

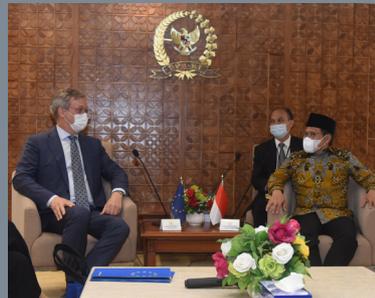




Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat melihat langsung perkembangan produk teknologi Nano di Teheran, Iran, Jumat (6/5/2022).
Foto: Azka/Man



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar bersilaturahmi Insan Media di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4/2022). Foto: Munchen/Man



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima *courtesy call* Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Picket di Ruang Delegasi DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).
Foto: Dji/Man



Sekjen DPR RI Indra Iskandar membuka Bazar Ramadan yang diselenggarakan oleh Korpri Setjen DPR RI di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2022). Foto: Runi/Man

Menyongsong Fajar nan Fitri

Perayaan Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim setiap tahunnya. Setelah dua tahun dilanda pandemi covid-19, rindu para pekerja dan buruh rantau untuk bisa merayakan momen Lebaran di kampung halaman pun akhirnya bisa terlampaskan. Selain mudik, ada pula tradisi menarik yang kerap dilakukan oleh masyarakat dalam menyambut datangnya hari kemenangan setelah satu bulan penuh berpuasa. Meski hal itu kerap berulang, namun keseruannya seakan tidak pernah sirna tergilas jaman.

Teks dan Foto : Devi Iriandi



Stasiun Pasar Senen yang berlokasi di kawasan kotamadya Jakarta Pusat menjadi salah satu stasiun kereta api yang dipilih oleh para pemudik untuk bisa pulang kampung saat mudik Lebaran, Kamis (28/4/2022).



Seorang petugas bagian informasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkeliling memberikan informasi secara mobile kepada pengguna jasa angkutan kereta api di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2022)



Para penumpang kereta api yang akan melakukan mudik Lebaran sudah berdatangan dan mulai memadati Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (28/4/2022).



Porter dan petugas kebersihan di Stasiun Pasar Senen Jakarta sibuk berjabaku menunaikan tugasnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa kereta api, Kamis (28/4/2022).



Gepokan uang kertas rupiah baru banyak diminati masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri untuk dapat dibagikan kepada sanak keluarga dan handai taulan saat momen Lebaran, Jakarta, Jum'at (29/4/2022).



Suasana toko yang menjual produk pakaian dan keperluan fashion lainnya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yang menawarkan berbagai potongan harga pada setiap item barang yang dijual, Jum'at (29/4/2022).



Pedagang kulit ketupat musiman tengah menjajakan dagangannya di kawasan Pasar Nangka, Jakarta Pusat, Jum'at (29/4/2022). Foto: Dep



Pedagang kulit ketupat sedang bertransaksi dengan seorang wanita yang hendak membeli barang dagangannya yang digelar di Pasar Nangka Jakarta Pusat, Jum'at (29/4/2022).



Pedagang kulit ketupat mengikat beberapa kulit ketupat yang akan dijual. Kulit ketupat yang dijual dipasaran biasanya sudah dalam bentuk ikatan jumlah tertentu, Jakarta, Jum'at (29/4/2022).



Aktifitas membuat kue kering khas Lebaran yang akan disajikan untuk menyambut tamu dan anggota keluarga yang hadir ke rumah pada momen Hari Raya Idul Fitri, Jakarta, Sabtu (30/4/2022).



H.A. Bakri HM :

**Berawal Dari Panjat
Pohon Kelapa,
Berakhir Di Puncak
Senayan**

Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Hal itulah yang terus diyakini H.A. Bakri HM hingga kini. Jika saat kecil, Bakri memanjat puluhan pohon kelapa, kini ia berhasil memanjat karir politiknya dari sebuah desa terpencil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi menuju Ibu Kota Jakarta.



Bakri di ruang kerjanya.

PRIMA/PDT

Terlahir sebagai anak laki satu-satunya di keluarga, saat usia sekolah dasar, Bakri sudah dididik untuk disiplin dan bekerja keras. Tidak ada kata bermain dalam kamusnya. Sholat, sekolah dan mengaji memang menjadi kewajiban utama Bakri yang tidak bisa ditawar. Padahal anak seusianya tengah bermain dengan riangnya.

Namun ada kewajiban lain yang juga dilakoninya adalah turut menunggui toko sembako dan kelontong milik sang ibu. Bahkan di akhir pekan sang ayah meminta Bakri untuk membantunya di kebun kelapa. Bakri kerap diminta untuk ikut memetik kelapa. Tak ada lelah bagi Bakri untuk melakukan itu semua. Tubuh kecil Bakri dengan lincah langsung memanjat dengan cepat satu per satu pohon kelapa yang menjulang tinggi dengan rata-rata 10 hingga 15 meter.

"Pada awalnya memang ada sedikit rasa takut jatuh saat memanjat, tapi rasa itu buru-buru saya kesampingkan. Sebagai anak laki satu-satunya di keluarga kami, saya tentu harus bisa menggantikan posisi ayah, termasuk menjadi petani kelapa yang tentu harus bisa

memanjat pohonnya juga," cerita Bakri kepada **Parlementaria**.

Meski demikian, darah wiraswasta dan jiwa bisnis dari sang ibu lebih kental mengalir dalam tubuh Bakri.

Jiwa bisnis Bakri sudah terlihat sejak kecil, terutama ketika Bulan Ramadhan tiba. Usai sholat tarawih dan ketika libur sekolah, Bakri berjualan kembang api dan sejenisnya. Untung yang tak seberapa itu tak menyurutkan rasa syukurnya karena telah berhasil menjual dagangannya. Uangnya pun langsung ia serahkan kepada sang bunda.

Berbisnis Sejak Muda

Kejarlah ilmu hingga ke negeri Cina. Begitulah kira-kira gambaran kondisi Bakri usai lulus SDN 28/V Sibur Naik, Jambi. Di desanya belum ada SMP, sehingga Bakri pun harus hijrah ke Kota Jambi untuk menuntut ilmu, dan menggapai mimpinya. Ia berhasil sekolah di SMPN 9, Jambi. Untuk sampai Kota Jambi saat itu Bakri harus melewati perjalanan dengan kapal laut selama satu hari satu malam. Memang berat untuk anak seusianya, yang harus jauh dari orang tua. Namun buru-buru ia tampik rasa itu, dengan tekad harus berhasil menjalani semua itu demi

masa depan yang lebih baik lagi.

Di Kota Jambi, ia menyewa sebuah rumah bersama beberapa temannya dan mulai berbisnis alias berdagang. Jika libur sekolah tiba, Bakri membeli barang di Kota Jambi untuk kemudian dibawa dan dijual ketika kembali ke desa.

Dagangannya itu ia bawa dengan menumpang kapal laut dengan perjalanan selama kurang lebih satu hari, satu malam. Lusnya ia balik ke Jambi dengan membawa kopra dari kampungnya untuk dijual di Kota Jambi. Tak berlebihan jika Bakri mengaku bahwa sejak SMP sudah memiliki uang jutaan, hasil kerja kerasnya sendiri.

"Sejak SMP saya sudah memiliki uang jutaan," akunya. Lulus SMP, Bakri melanjutkan sekolah di SMA Xaverius I Jambi. Sekolah yang menurutnya terbaik di jamannya, terlebih lagi dengan kedisiplinan dan etika. Mata pelajaran yang semakin rumit, plus kegiatan sekolah lainnya memang cukup banyak menyita waktunya. Namun hal itu tak lantas menghentikan usahanya. Bahkan, ia mulai mengembangkan bisnisnya. Ia hanya mengirimkan dagangan ke kampung halamannya kepada orang yang dipercayanya. Bakri pun memberanikan diri merintis usahanya

di Kota Jambi, dengan membuka toko sendiri.

Berhasil menyelesaikan pendidikan SMA, sejatinya sudah terbilang tinggi untuk ukuran masyarakat di kampungnya. Namun tidak demikian halnya dengan Bakri. Didukung oleh kedua orangtuanya yang berharap sang anak bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin, Bakri pun melanjutkan kuliahnya di STIE Muhammadiyah Jambi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Jadi Kontraktor

Di masa-masa kuliah, Bakri melihat peluang bisnis lain di luar usaha sembako dan kelontong. Ia melihat saat itu pembangunan di Jambi tengah berkembang pesat. Hal itu ditandai dengan banyak teman dan sahabat-sahabatnya yang menjadi kontraktor. Sehingga Bakri pun merubah haluan dengan berdagang bahan-bahan bangunan.

Saat itu tidak sedikit kontraktor yang mengambil bahan-bahan bangunan untuk proyeknya di toko bangunan milik Bakri. Tak berlebihan jika kemudian usahanya itu berkembang pesat. Dan di saat itu pula ia mencoba 'mencuri' ilmu dari teman-teman kontraktornya. Hingga akhirnya ia tertarik untuk mengikuti jejak rekannya tersebut dengan menjadi kontraktor.

Proyek pertama yang datang kepadanya adalah tawaran untuk membangun Masjid di salah satu desa tertinggal di Provinsi Jambi, namun dengan dana yang sangat terbatas. Pihak pengelola Masjid hanya memiliki dana 20 juta, sementara dana yang dibutuhkan untuk membuat masjid tersebut sekitar 40 jutaan. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bakri yang memang baru memulai langkahnya menjadi kontraktor. Dengan tekad dan nekat, ia mengamini untuk

mengerjakan proyek pembangunan masjid tersebut.

Singkat cerita, berkat kegigihannya dan niat baik, ia berhasil membangun masjid tersebut sesuai dengan rencana. Sontak, hal itu mengundang decak kagum dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah yang notabene sebagai pemberi proyek tersebut. Bagaimana bisa dengan dana yang hanya setengahnya bisa berhasil membangun masjid dengan spesifikasi dan bentuk sesuai yang direncanakan. Usut punya usut, ternyata selain menomboki dari kantong sendiri, ia meminta bantuan saudara-saudaranya untuk menjadi donator pembangunan masjid tersebut.

Siapa sangka niat baiknya itu berbuah manis. Debut perdananya sebagai kontraktor itu membuka peluang lain. Salah satu proyek lainnya yang berhasil ia kerjakan adalah pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Sejak saat itu, ia pun berhasil mendirikan beberapa perusahaan.

Organisasi Sekolah dan Kampus

Meski sempat berpindah kampus, namun akhirnya Bakri berhasil menyelesaikan kuliah dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Muhammadiyah Jambi.

Di sisi lain, sejatinya pria kelahiran Jambi 15 mei 1968 ini telah aktif diberbagai organisasi sekolah, maupun luar sekolah. Bahkan saat duduk di bangku SMP dan SMA, ia berhasil terpilih sebagai Ketua Osis (organisasi intra sekolah). Bahkan aktivitasnya di dunia bisnis di Provinsi Jambi berhasil mengantarkannya menduduki jabatan bergengsi dalam organisasi bisnis nasional, diantaranya Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Jambi, Ketua Umum Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan Ketua Gapensi (Gabungan Penguasa Seluruh Indonesia) untuk wilayah Jambi, diantaranya Ketua Umum MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Provinsi



Bakri saat akan meninjau program aspirasi yang diperjuangkannya

Jambi. Kemudian Ketua Umum ICBC (Indonesia Cina Bisnis Concil) Provinsi Jambi.

Bahkan di luar organisasi bisnisnya, Bakri berhasil menjadi Ketua PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) dan pengurus KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi Jambi.

Masuk Partai Politik

Dengan modal ekonomi yang cukup besar, Bakri memang aktif dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan sosial. Impiannya untuk melihat daerah kelahirannya maju, tidak hanya dari sisi pembangunan infrastrukturnya tetapi juga selalu berupaya untuk berperan dalam menentukan sebuah kebijakan. Tak heran jika kemudian ia mengamini tawaran sahabatnya yang tak lain adalah Gubernur Jambi pasca reformasi Zulkifli Nurdin untuk bergabung dalam partai politik yang diketuainya.

Singkat cerita, Putra dari pasangan H. Musa dan Hj. Yondeng ini bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) wilayah Jambi. Tak lama, Bakri terpilih menjadi bendahara DPW PAN Jambi dan kemudian terpilih menjadi salah satu unsur ketua di DPP PAN sebagai Ketua Bapilu PAN untuk wilayah Jambi-Bengkulu. Pada tahun 2004, Bakri semakin memantapkan langkahnya dalam dunia politik dengan mengikuti pemilihan calon legislatif.

Dalam pemilihan tersebut, meski berhasil memperoleh suara terbanyak, namun karena aturan saat itu berdasarkan nomor urut, maka hal itu menggagalkan langkahnya untuk melenggang ke Senayan. Baru ketika pada pemilihan umum berikutnya, tahun 2009, dimana aturan tidak berdasarkan nomer urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak, ia pun akhirnya berhasil melenggang ke Senayan meski



Bakri (kiri) saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI



“Saya tidak ada target khusus dalam karir politik saya. Saya hanya ingin terus memperjuangkan kehidupan masyarakat Jambi kearah yang lebih baik lagi, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas, maupun kesejahteraan lainnya.”

memiliki nomer urut 4 untuk daerah pemilihan Jambi.

Menjadi anggota legislatif, Bakri duduk di Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, perumahan rakyat dan pekerjaan umum atau infrastruktur, serta cuaca. Hal itu tentu sangat sesuai dengan latar belakang sebelumnya yakni sebagai pengusaha jasa konstruksi di Jambi. Dan kini, di periode ketiganya menjabat sebagai anggota legislatif, ia tidak hanya duduk di Komisi V DPR

RI tapi juga terpilih menjadi Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Sebagaimana niat dan tekadnya untuk terus berbuat, berjuang bagi masyarakat provinsinya, telah banyak pembangunan di Jambi yang merupakan hasil perjuangannya. Seperti Jembatan Gantung, Revitalisasi Sekolah, Tanggul, Irigasi Desa, Normalisasi Sungai, Halte Sungai, Pelebaran dan Perbaikan, bahkan beberapa bandara dan pelabuhan di Jambi tercipta salah satunya berkat perjuangannya.

Kini, tidak ada target tertentu dalam karir politiknya selain selalu berjuang dan memperjuangkan nasib masyarakat, terutama Provinsi Jambi.

“Saya tidak ada target khusus dalam karir politik saya. Saya hanya ingin terus memperjuangkan kehidupan masyarakat Jambi kearah yang lebih baik lagi, baik dari sisi infrastruktur, fasilitas, maupun kesejahteraan lainnya,” pungkas Ketua Umum Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Jambi tahun 2019 ini. ● **ayu/es**

BAKTI Harus Hadirkan Layanan Internet Berkualitas

Komisi I DPR RI memberi atensi khusus pada program yang digagas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terkait menghadirkan layanan internet bagi masyarakat. Mengingat, kehidupan manusia modern tidak bisa dilepaskan dengan jaringan internet.



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid saat pertemuan dengan Direktur Utama BAKTI membahas Program Penyediaan Akses Internet di Sumatera Utara.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid, saat memimpin pertemuan Tim Panja Penyediaan Akses Internet Komisi I DPR RI dengan Direktur Utama BAKTI Anang Latif di Sumatera Utara, pertengahan April lalu berharap, program yang sudah digagas oleh Kementerian Kominfo, khususnya BAKTI untuk penyelenggaraan satelit baru di tahun 2023 dapat cepat terlaksana. Mengingat penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia yang sudah cukup padat ditambah dengan beragam konten yang ada saat ini.

"Nampaknya dengan penggunaan internet yang sudah cukup padat dan konten-konten yang sekarang tidak lagi teks, video dan lain-lain, memerlukan *bandwidth* yang lebih besar. Dan ini kelihatannya yang dilakukan *bandwidth*-nya sudah cukup penuh yang dilakukan oleh

BAKTI. Yang digunakan secara gratis oleh masyarakat, baik itu tenaga kesehatan, maupun juga murid-murid di sekolah-sekolah. Jadi kita harapkan nanti dengan beroperasinya satelit yang baru nanti insyaAllah kendala-kendala itu bisa tertangani," jelas Meutya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan Direktur Utama BAKTI tentang Program Penyediaan Akses Internet di Sumatera Utara merujuk pada Peta Digital 2021-2024. Selanjutnya Tim Panja mendukung BAKTI untuk terus melakukan langkah-langkah yang tepat dan strategis dalam mengantisipasi berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan akses internet bagi masyarakat terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pengembangan usaha.

Berkaitan dengan wilayah *blank spot* yang masih ada di Sumatera Utara, Komisi I DPR RI meminta

BAKTI Kominfo untuk terus bersinergi dengan penyelenggara operator seluler dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G.

Ingatkan Dampak Negatif Internet

Di Makassar, Anggota Komisi I DPR RI Fadhlullah mengingatkan dampak negatif penggunaan internet, khususnya keberadaan situs judi *online*. Fadhlullah menceritakan saat ini penggunaan situs judi *online* sudah marak digunakan oleh masyarakat, khususnya yang terjadi pada daerah pemilihannya, Aceh.

"Baru-baru ini kejadian di daerah saya. Mereka menggunakan (internet) untuk judi *online*. Kita sudah menyurati Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Gubernur Aceh sudah menyurati Kominfo. Karena Aceh daerah otonomi khusus, agar bisa ada *forbidden*-nya atau memblokir khusus aplikasi judi *online*. Kita akan melakukan permohonan,



Anggota Komisi I DPR RI Fadhlullah saat pertemuan dengan BAKTI Kominfo Sulawesi Selatan.

ulama di Aceh semua mengajukan ke pemerintah Aceh, Kominfo di Aceh, Kepala Dinas juga sama," kata Fadhlullah.

Selain itu, dampak buruk yang paling nyata dengan adanya situs judi *online*, kata Fadhlullah, terjadinya tindak pidana pencurian terhadap sejumlah komponen mobil dinas Kominfo di Aceh. "Ini kejadian di depan saya, mobil kepala dinas Kominfo bannya dicuri, empat-empatnya dicuri bannya. Ketika pelakunya ditangkapnya, dia jual barangnya, dia

gunakan uang itu untuk judi *online*," tandas politisi Partai Gerindra itu.

Oleh karena itu, Fadhlullah berharap, BAKTI sebagai penyedia layanan internet mampu memberikan solusi terhadap adanya dan maraknya penggunaan situs judi *online* yang dapat mengakibatkan rusaknya generasi-generasi penerus bangsa. "Ini bagaimana solusinya dari BAKTI, apakah nanti *provider*-nya yang melakukan blokir atau bagaimana lah, ini demi anak bangsa kita ke depan," tutup Fadhlullah.

Perlu Pendekatan Khusus Atasi Konflik Natuna

Anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf mengusulkan strategi pendekatan industri yang mengutamakan kesejahteraan nelayan dan tidak hanya terfokus pada pendekatan militer dalam mengatasi konflik di wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Ia berpendapat kehadiran nelayan di wilayah *grey area* akan menegaskan kepada negara lain bahwa wilayah tersebut adalah wilayah ZEE Indonesia yang mengakui sistem hukum laut United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

"Jika kita bicara sejauh ini nelayan harus hadir, tidak hanya coast guard. Kita bisa katakan nelayan kita *enggga* bisa di situ pendekatannya bukan saja hanya pendekatan militer, tetapi juga pendekatan kesejahteraan nelayan kita," terang Al Muzammil saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi I DPR RI dengan Sestama Bakamla RI Laksda TNI S. Irawan, Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Laksamana Pertama Hadi Pranoto dan jajarannya, di Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Kepulauan Riau.

Ia menceritakan, pada kunjungan Komisi I DPR RI ke Kepulauan Natuna beberapa waktu lalu, kelompok nelayan di daerah tersebut mengeluhkan tidak adanya dukungan pemerintah terhadap nelayan lokal dan justru menghadirkan kelompok nelayan dari daerah lain. Ia melihat konflik seperti ini bisa terhindari jika pemerintah dapat mengimbangi dengan memberikan dukungan kepada nelayan lokal dan penyediaan logistik yang memadai, sehingga akan banyak nelayan yang berkumpul di Laut Natuna Utara untuk mencegah masuknya nelayan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia. • [ndy,qq,nap/es](#)



Anggota Komisi I DPR RI Al Muzammil Yusuf saat pertemuan di Kantor Kamla Zona Maritim Barat, Batam, Kepri.

Apresiasi Capaian dan Kinerja Pemerintah Daerah

Bermitra dengan pemerintah daerah, Komisi II DPR RI dalam lawatannya ke beberapa daerah mengapresiasi capaian dan kinerja pemerintah. Di antaranya penanganan pandemi Covid-19, Mall Pelayanan Publik, hingga penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengapresiasi upaya

Pemerintah Kota Sukabumi memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima dan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki sepanjang tahun 2021-2022. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi sekaligus indeks pembangunan manusia (IPM) yang meningkat di Kota Sukabumi.

Dirinya menilai pencapaian ini patut dibanggakan di tengah pandemi Covid-19 masih melanda di Indonesia. "Yang paling penting itu, apa yang kami lihat di Kota Sukabumi ini boleh dikatakan penyelenggaraan pemerintahan itu cukup baik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 3,75 persen. Kemudian IPM-nya juga meningkat mencapai 74 persen. Itu

bagus sekali," tutur Syamsurizal di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, baru-baru ini.

Ia menilai, Pemerintah Kota Sukabumi mampu mengatasi kawasan kumuh yang sebelumnya meliputi sekitar 39 hektar, namun kini turun hingga tersisa 8 hektar saja. Baginya, komitmen untuk menangani permasalahan yang dekat dengan masyarakat tidak lepas dari dukungan setiap *stakeholder* yang melekat pemerintah, lembaga, sekaligus masyarakat sekitar.

menjadi kota yang aman, sejahtera, dan produktif.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Garut Cukup Baik

Masa pandemi Covid-19 yang telah dirasakan dalam waktu setahun lebih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam hal memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat

"Ini menggambarkan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan telah melaksanakan tugasnya yang ada di Kota Sukabumi dengan cukup baik. Tentu, ada *stakeholder* yang ikut dalam membantu urusan pemerintah daerah," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu.

Oleh karena itu, ke depannya Syamsurizal ingin setiap komponen Pemerintah Kota Sukabumi tetap mempertahankan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih bersama. Sehingga, Kota Sukabumi

Transformasi pelayanan publik ke arah digital menjadi suatu keharusan agar masyarakat tetap mendapat pelayanan publik yang prima.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut cukup berjalan dengan baik dan tidak terlalu terkendala meski di tengah pandemi. "Kabupaten Garut cukup baik dari segi pelayanan dan sebagainya cukup baik," ujarnya di Kantor Bupati Kabupaten Garut, Jawa Barat.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Garut, Jawa Barat.

Meski dinilai sudah berjalan cukup baik, ada beberapa permasalahan yang diungkapkan Bupati Garut Rudy Gunawan yang perlu diurai di Kabupaten Garut. Di antaranya permasalahan blangko e-KTP. Rudy mengungkapkan bahwa di Kabupaten Garut, ketersediaan blangko e-KTP masih belum memadai dan distribusi blangko e-KTP yang belum berjalan lancar.

Merespon hal tersebut, Saan mengatakan Kementerian Dalam Negeri sudah mencetak kembali blangko e-KTP dan hanya tinggal menunggu distribusi-distribusi ke daerah. "Terkait dengan blangko e-KTP, tadi sudah disampaikan, Maret sudah dicetak lagi di Kementerian Dalam Negeri, mungkin tinggal distribusi ke daerah-daerah yang memang dianggap mengalami kekurangan terkait blangko e-KTP. Hal itu tentunya sudah teratasi karena memang sudah tersedia di Kementerian Dalam Negeri," sebutnya.

Kota Cirebon Perlu Bangun MPP

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyoroti Kota Cirebon yang menjadi pusat kegiatan

perdagangan maupun hal pelayanan publik. Apalagi masyarakat di kota-kota sekitarnya membutuhkan Kota Cirebon dalam memanfaatkan fasilitas publik terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

"Cirebon adalah kota yang menjadi pusat bukan saja untuk warga yang ber-KTP Kota Cirebon, tapi ternyata kota-kota sekitarnya juga sangat membutuhkan Kota Cirebon (dalam hal) untuk perdagangan. Produk-produk (dagang) luar Cirebon juga ada di sini, termasuk juga misalnya fasilitas kesehatan (maupun) pendidikan itu yang mengakses bukan saja

warga Cirebon tapi juga orang lain (di luar Kota Cirebon). Menariknya dari Kota Cirebon juga memberikan efek (manfaat) kepada wilayah sekitarnya, disamping wilayah di sekitarnya juga mendapatkan efek baik bagi Kota Cirebon sendiri," jelas Yanuar usai pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintahan Kota Cirebon, di Kantor Wali Kota Cirebon.

Dari penuturan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis pada pertemuan tersebut diketahui Kota Cirebon sendiri belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP), padahal MPP begitu penting untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Yanuar mendorong Kota Cirebon untuk segera membangun MPP.

"Tadi catatan pentingnya *how to* meningkatkan pelayanan publik dalam kota yang semacam ini dengan usul, percepat dong (pembangunan) mal pelayanan publik. Karena di tempat lain sudah ada kenapa di Cirebon belum, padahal Cirebon tergolong kota yang cukup maju di Jawa Barat. Mal pelayanan publik akan membantu masyarakat mempermudah akses pelayanan, tidak repot, tidak ribet," tegas politisi PKB tersebut. ● nvl, bia, ts/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat menyampaikan pandangannya dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Cirebon, Jawa Barat.

Soroti Permasalahan Mitra Kerja di Daerah

Komisi III DPR RI menyoroti beberapa permasalahan yang dihadapi mitra kerjanya di daerah. Seperti maraknya judi *online* dan peredaran narkoba di Riau, penambahan anggaran pembangunan Balai Rehabilitasi Narkoba serta penegakan hukum dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat bertukar cenderamata dengan Kapolda Riau.

Di Riau, Tim Kunker Komisi III DPR RI memberi atensi terkait maraknya judi saat bulan Ramadan, termasuk beberapa perusahaan sawit yang diduga menanam pohon sawit merambah hingga hutan lindung. Bahkan, tanaman-tanaman tersebut melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan sawit. Secara khusus, Komisi III DPR RI meminta Kapolda Riau untuk menanganinya.

"Dari hasil kunjungan didapati bahwa judi *online* dan judi konvensional selama bulan puasa

makin marak dan Kapolda Riau berkomitmen selama menjabat sebagai pimpinan Polri di daerah tidak akan ada lagi judi lagi di Pekanbaru," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kapolda Riau dan Kepala BNNP Riau di Pekanbaru, April lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menginginkan pembentukan posko sebagai upaya memotong masuknya peredaran narkoba dari luar negeri seperti Malaysia. Menurut Pangeran, secara geografis wilayah

Riau, dari Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) hingga Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terdapat perbatasan dengan negara tetangga sepanjang 370 mil atau 685,24 kilometer.

Sehingga Fraksi PAN ini berharap, posko tersebut dapat efektif untuk memotong jalur peredaran narkoba dari jalur Rohil dan Inhil yang merupakan masuknya jalur narkoba jaringan internasional. "Dari *entry point* yang disampaikan BNNP, mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda kita ke depan terkait posko untuk memotong masuknya narkoba (ke wilayah Indonesia)," tutur Pangeran.

Dukung Penambahan Anggaran Pembangunan Balai Rehabilitasi Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama mendukung penambahan anggaran guna pembangunan Balai Rehabilitasi Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut informasi yang ia dapat, data tahun 2021 lalu, Sumsel menempati peringkat kedua tertinggi se-Indonesia dalam kasus penyalahgunaan narkoba setelah Medan, Sumatera Utara.

"Ya harusnya kalau memang diperlukan dana bangun balai rehabilitasi ya silakan ajukan. Kita siap mengawal. Karena anak bangsa ini siapa *sih* yang ingin tercandu (narkoba). Jadi, yang kita inginkan anak bangsa ini kalau dia pemakai, kita *obatin*. Dia sakit kita *obatin*. Jangan langsung dilempar ke lembaga pemsayarakatan. Apalagi, tuntutan misalnya minimal empat

tahun kan," ujar Bambang usai pertemuan dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan BNNP di Palembang, Sumsel.

Bambang menjelaskan, dengan rata-rata hukuman minimal empat tahun tersebut, maka tidak akan ada pengguna narkoba yang ditangkap akan sembuh. Karena itu, harusnya bagi pengguna narkoba tersebut harusnya dimasukkan ke balai rehabilitasi.

"Namun, ternyata di Sumsel ini belum ada balai rehabilitasi. Harusnya, pengguna narkoba fokus diobati di balai rehabilitasi. Karena kalau tidak diobati nanti masih ketergantungan, sehingga pengedaran tidak bisa ditekan," tegas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Penegakan Hukum Harus Mampu Optimalkan Penerimaan Negara

Komisi III DPR RI menyoroiti soal tambang ilegal yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menekankan upaya penegakan hukum harus mampu optimalkan penerimaan negara. Hal ini ka ungkapkan setelah melakukan rapat saat Kunjungan Kerja



Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama saat pertemuan dengan Kapolda dan BNNP Sumsel.

(Kunker) Reses dengan Kapolda dan Kajati di Gorontalo dengan menyoroiti soal tambang ilegal yang terjadi di Provinsi Gorontalo.

Menurutnya jika kasus ini bisa ditangani dengan baik maka berpotensi menambah pemasukan negara dan meluaskan peluang fiskal perekonomian. "Ini adalah potensi pemasukan negara yang besar apabila bisa ditangani penegak hukum dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional. Sehingga jika kasus-kasus tambang ilegal bisa diselesaikan bisa memulihkan pemasukan negara, meluaskan peluang fiskal

perekonomian kita," ujar Romo di Gorontalo, baru-baru ini.

la mengharapkan agar Kejaksaan Tinggi Gorontalo bisa menangani kasus pertambangan ilegal. "Yang menjadi catatan kita adalah masalah pertambangan ketika kita kroscek di Kejaksaan ternyata belum masuk, berarti penyidikannya masih terhenti di Kepolisian," tutur Politisi fraksi Partai Gerindra ini.

Dalam Kunker Reses di Gorontalo ini, Komisi III memberikan *concern* pada evaluasi capaian kinerja penanganan perkara atau penegakan hukum oleh Kejaksaan di tahun 2021 dan awal 2022 ini. Perkara-perkara yang menonjol atau perkara yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan negara dan pemulihan ekonomi nasional, demikian pula kendala yang masih dihadapi.

Tak hanya itu, Komisi III juga melakukan pengawasan pada implementasi reformasi Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui fungsi pengawasan internal Kejaksaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja seluruh Jaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Demikian pula strategi tata kelola kepegawaian dalam rangka menjalankan sistem *reward and punishment* yang adil dan bersih. ● [hal](#), [rdn](#), [eko](#)/[es](#)



Anggota Komisi III DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i saat pertemuan dengan Kapolda dan Kajati Gorontalo.

Sektor Pertanian dan Peternakan Harus Dikembangkan

Sektor pertanian dan peternakan tak pernah luput dari pengawasan Komisi IV DPR RI. Dalam pengembangannya, Komisi IV meminta agar sektor pertanian lebih dikembangkan lagi menjadi destinasi wisata (Agrowisata). Di bidang peternakan, Komisi IV menginginkan agar korporasi sapi di PPU Kaltim memenuhi kebutuhan daging sapi masyarakat.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin peninjauan agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam, Jambi.

Di Kota Jambi, agrowisata nanas merupakan salah satu lokasi komoditi hortikultura yang juga sebagai tujuan wisata alam pertanian bagi masyarakat sekitarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan infrastruktur menuju agrowisata pertanian seluas 900 hektar ini perlu dibenahi dan patut dikembangkan. Apalagi nanas yang berada di Desa Tangkit Baru dikenal sebagai salah satu keunggulan dan komoditas kebanggaan Jambi, dan menjadi

salah satu ikon di sektor pertanian daerah tersebut.

"Agrowisata nanas yang berbasis sumber daya alam potensial ini patut dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar," ungkap Dedi saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau agrowisata nanas di Kecamatan Sei Gelam, Muaro Jambi, Jambi, baru-baru ini.

Ada beberapa aspirasi yang berhasil dihimpun Tim Kunker Komisi IV DPR RI. Dimana, para petani mengeluhkan infrastruktur jalan

yang kurang baik, harga pupuk dan obat-obatan yang cukup tinggi, serta tidak adanya STA (Stasiun Terminal Agribisnis).

Komisi IV menyambut baik usulan terkait adanya Stasiun Terminal Buah untuk menghindari perbedaan harga antar petani dalam hal pemasaran. Namun masyarakat harus juga memastikan siapa yang nanti akan mengelola terminal tersebut.

Desa Korporasi Sapi Bisa Penuhi Kebutuhan Daging Sapi

Konsep pengembangan desa korporasi sapi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kelak diproyeksikan bisa menjawab tantangan kebutuhan daging sapi di Kaltim dan daerah-daerah lain. Ini merupakan program prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) sejak 2021 lalu.

Saat pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten PPU di Desa Labangka Barat, Kaltim, akhir April lalu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono mengungkapkan, desa ini ada kelompok tani bernama Petani Maju yang dipercaya mengelola sekitar 100 sapi, baik sapi indukan maupun penggemukan. Bahkan, sapi-sapi ini sudah diasuransikan ke PT. Jasindo oleh Kementan. Jadi, bila ada yang mati akan diganti.

"Program pengembangan sapi ini sudah sangat baik. Peternakan kini sudah menjadi ekosistem usaha. Masyarakat menyediakan lahannya dan bantuan sapi diasistensi pemerintah. Bahkan, sapinya dilindungi dengan asuransi serta

diberi pakan yang memadai. Saya rasa ini konsep yang baik. Desa korporasi sapi ini merupakan jawaban dari kebutuhan rakyat di Kaltim," ungkap Budi.

Apalagi, kelak bila pembangunan ibu kota negara (IKN) sudah rampung, akan banyak penduduk bermigrasi. Dan kebutuhan daging sapi pasti meningkat. Selama ini, kata Budi, Kaltim selalu kekurangan pasokan daging sapi. Kebutuhan daging sapi yang tinggi itu didatangkan dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB, pulau Jawa, bahkan Lampung. Disampaikan politisi Partai Gerindra ini, Kaltim sebetulnya belum mampu berdiri sendiri memenuhi kebutuhan pangannya.

Dengan adanya desa korporasi sapi ini, perlahan Kaltim bisa mandiri dan kelak bisa membantu daerah lain yang kekurangan pasokan daging sapi.

Harga Minyak Goreng Curah di Sultra Masih Tinggi

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus mengungkapkan, harga jual minyak goreng curah di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini masih cukup tinggi, yakni sebesar Rp25.000 per liter. Padahal telah ada ketetapan harga yang dibuat oleh pemerintah



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono saat pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten PPU di Labangka Barat, Kaltim.

menyangkut soal harga jual minyak goreng curah di pasaran, yaitu Rp14.000 per liter.

"Kita mau mengecek bagaimana ketersediaan pangan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Ternyata distribusi minyak goreng masih mengalami masalah dan kendala, yang tadinya kita sudah mengetahui ada ketetapan harga per liter Rp14.000 ternyata yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini harga minyak goreng curah sampai dengan Rp25.000. Ini sangat disayangkan dan bagaimana dengan ketetapan pemerintah untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia," tutur Alien

Mus di sela-sela kegiatan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Politisi Partai Golkar itu mendapati informasi, Sultra mengambil pasokan minyak gorengnya dari Sulawesi Barat. Yang mana bila dikalkulasi, dengan jumlah pasokan 22.000 ton dan ditambah dengan biaya distribusi dari Sulawesi Barat sampai ke Sultra itu besaran subsidi bisa mencapai angka Rp5 miliar.

"Pemerintah harus bisa memberikan satu pemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat, yang tidak hanya memberikan wacana seperti itu, namun juga memikirkan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau dan tidak hanya di satu dataran saja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang baik dan tidak ada kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia," imbuh Alien.

Dikatakan legislator dapil Maluku Utara tersebut, untuk urusan minyak goreng, hulunya memang yang ada di bawah kemitraan Komisi IV DPR RI. Sedangkan hilirnya ada di Kementerian Perdagangan. Namun khusus untuk masalah minyak goreng saat ini tanggung jawabnya sudah diambil alih oleh Kementerian Perindustrian. ● tra,mh,dep/es



Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV di Kendari, Sultra.

Tinjau Progres Pembangunan di Daerah

Komisi V DPR RI terus mengawasi berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan mitra kerjanya. Selain mengawasi program BSPS, dan infratraktur jalan, pada kunjunga kerja kali ini, Komisi V juga berkomitmen untuk mengawasi proyek pembangunan IKN.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat mengoptimalkan berjalannya Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya dalam membantu perbaikan rumah para korban bencana alam.

"Dalam hal ini, kita (Komisi V DPR RI) lebih mendorong khususnya untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, agar dapat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami bencana gempa bumi ini, terutama untuk perbaikan kondisi rumah mereka," tegasnya usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, April ini.

Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni. Dalam hal ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menggulirkan bantuan Program BSPS atau dikenal dengan bedah rumah ke beberapa daerah di Sumbar.

"Kita berharap, mudah-mudahan Program (BSPS) ini juga bisa kita persiapkan bukan hanya untuk memperbaiki rumah-rumah yang ada dalam konteks normal, tetapi dalam kondisi bencana alam pun, program ini kira diharapkan bisa dapat memberi dukungan kepada masyarakat kita secara langsung," harap politisi Partai Gerindra itu.

Andi Iwan juga menegaskan, peran aktif pemerintah pusat sangat diperlukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.

Tinjau Progres Infrastruktur di Kalsel

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan berbagai infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa lokasi yang menjadi titik peninjauan antara lain progres pekerjaan Jalan Matraman ke Sungai Ulin di Kabupaten Banjar. Peninjauan pembangunan jalan dan jembatan Kembar di Kabupaten Balangan, serta peninjauan lokasi Bandara Warokin dan rencana pelebaran jalan Mabuun-Bandara Warokin.

"Berdasarkan data dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, disebutkan bahwa kemandapan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 95,47 persen, sedangkan untuk kemandapan jembatan hingga akhir 2021 sebesar 81,18 persen. Kondisi ini tentunya berlaku di ruas jalan nasional Kalsel sepanjang 1.204,30 kilometer," ungkap Wakil Ketua



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.

DIPA/PDT



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifulah Tamliha saat meninjau progres pekerjaan Jalan Matraman ke Sungai Ulin di Kabupaten Banjar.

Komisi V DPR RI Syaifulah Tamliha di sela-sela memimpin kunjungan, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PPP ini menambahkan sesuai data dari BPJN Kalimantan Selatan, pembangunan infrastruktur Jalan akan terus dilakukan, diantaranya pada tahun 2022, BPJN Kalsel menyiapkan 40 paket kontraktual. Adapun ke-40 paket tersebut terdiri dari 11 paket MYC (9 paket MYC lanjutan + 2 paket MYC Percepatan SBSN 2021), 27 paket SYC baru dan 2 paket MYC baru. Untuk 27 paket SYC baru, terdiri dari 14 paket konsultansi (perencanaan dan pengawasan) dan 13 paket fisik.

"Ke-27 Paket ini sudah masuk tahap pelelangan. Sedangkan untuk 2 paket MYC baru, terdiri dari 1 paket fisik dan 1 paket pengawasan, di antara paket MYC baru yang proses lelang di BP2JK Kalsel saat ini yaitu Paket Preservasi Jalan Liang Anggang - Martapura - Batas Kota Rantau, dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp137,61 miliar dan dilaksanakan dalam 3 tahun anggaran (tahun 2021-2023) dengan target penanganan pelebaran jalan menuju standar dan penanganan jembatan," tandasnya.

Komitmen Kawal Pembangunan IKN

Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyatakan Komisi V DPR RI berkomitmen penuh siap mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar dapat terlaksana sebagaimana rencana. Irwan menegaskan Komisi V DPR RI tetap memberikan berbagai pandangan kritis yang wajib menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam pembangunan IKN Nusantara yakni terutama diperlukan perencanaan skema pembangunan komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar sebagai penyangga IKN serta pembangunan wilayah terdekat dalam hal ini kawasan timur Indonesia.

"Terdapat tiga tujuan utama IKN yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Pembangunan IKN menjadi upaya mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris. Maka, kegiatan perencanaan dan pembangunan IKN tentu menjadi tugas bersama

dalam rangka mendorong percepatan pemerataan dan meningkatkan perekonomian kawasan timur Indonesia," jelas Irwan Hal itu disampaikan Irwan saat meninjau Titik Nol IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Politisi Partai Demokrat tersebut lebih lanjut menuturkan, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah Pusat meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas. Terutama, tandas Irwan, seperti jalan dan jembatan serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan di wilayah terdekat dalam hal ini kawasan timur Indonesia. Tak hanya itu, diperlukan dukungan secara maksimal terhadap upaya pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi *smart forest city* yang ramah lingkungan.

● hnm,oji,pun/es



Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat kunjungan kerja di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dorong Kesiapan BUMN Hadapi Lebaran

Komisi VI DPR RI memastikan agar BUMN yang menjadi mitra kerjanya untuk bersiap melayani masyarakat jelang perayaan Idul Fitri 1443H. BUMN diharapkan untuk bersinergi dan memaksimalkan kinerja untuk meminimalisir dan memetakan setiap permasalahan yang kemungkinan terjadi.

Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan menyampaikan agar Kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor transportasi, khususnya yang ada di Jawa Timur, dapat berjalan secara maksimal, baik dalam sistem, manajemen, sinergisitas, dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Nasim mendorong Kementerian dan BUMN di sektor transportasi untuk menciptakan sinergisitas, khususnya jelang mudik Lebaran 2022.

"Jelang hari Raya Idulfitri ini pasti akan banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita siapkan (solusinya). Yang pertama, bagaimana nanti menghadapi antrean pemudik, bagaimana kita *maintenance* kebersihan, keamanan, keselamatan, persediaan tempat, dan juga transportasi, baik itu di perjalanan, seperti di Pelayaran Nasional Indonesia

(Pelni), pelabuhan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan semua BUMN di sektor transportasi," jelas Nasim saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PKB itu meminta seluruh Kementerian dan perusahaan BUMN di sektor transportasi agar mempersiapkan seluruh keperluan



Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi VI di Surabaya, Jawa Timur.

transportasi secara detail, sehingga pelayanan di sektor transportasi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi pemudik.

"Karena nanti ada antrian untuk pendaftaran tiket secara online, sehingga pendaftaran dapat dilakukan lebih praktis dan aman. Kemitraan BUMN agar dapat membantu hal tersebut, seperti ASDP, Pelni, PT. KAI, penerbangan, bahkan Damri, agar pelayanan benar-benar lebih maksimal," papar Nasim.

Pastikan Kesiapan BUMN Energi

Di Palembang, Sumatera Selatan, Tim Kunker Komisi VI DPR RI memastikan kesiapan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN energi menjelang Hari Raya Idulfitri dan Libur Lebaran di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui kementerian dan perusahaan BUMN telah melakukan

beberapa persiapan-persiapan dengan membuat program dan aplikasi yang dapat digunakan masyarakat. Program dan aplikasi tersebut diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan efisien guna memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Jadi, berdasarkan laporan, segala sesuatunya (terkait persiapan Lebaran) sudah terpapar secara sistematis dan bagus. Baik mengenai cara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di perjalanan, pasokan

listrik, maupun gas yang dibutuhkan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah di Palembang, Sumsel.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga menyampaikan prediksi peningkatan dan penurunan konsumsi gas. Konsumsi gas LPG 3kg atau gas melon diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 6,7 persen dibandingkan dengan konsumsi normalnya. Sedangkan penggunaan gas non-PSO baik rumah tangga dan bukan rumah tangga masih di bawah LPG 3kg, bahkan mengalami penurunan. Namun menurut Siti, penyaluran gas melon kepada masyarakat masih belum tepat sasaran.

“Gas melon semestinya diarahkan dan disasarkan untuk masyarakat bawah. Sehingga jangan sampai pemanfaatannya, dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat (mampu) yang seharusnya bukan menggunakan gas melon. Jadi kita harap, hal tersebut menjadi bagian dari regulasi yang lebih didisiplinkan kepada masyarakat,” pintanya.

Perlu Upaya Afirmatif untuk Hidupkan Perekonomian Bali



Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Bali.



Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat kunjungan kerja Komisi VI di Palembang, Sumsel.

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta meminta pemerintah melakukan berbagai upaya afirmatif untuk menggerakkan perekonomian di Bali. Menurutnya, Bali berbeda dengan provinsi dan kabupaten lainnya, karena memutlakkan kehadiran wisatawan dalam menggerakkan perekonomiannya.

“Oleh karena itu harus ada afirmatif untuk Bali termasuk dalam hal ini karena BUMN yang punya banyak uang, mereka menggerakkan segala potensinya untuk mengadakan kegiatan di Bali agar pariwisata segera pulih,” kata Nyoman di Bali.

Politisi PDI-Perjuangan itu meminta BUMN melibatkan para pengusaha lokal saat membuat atau menggelar kegiatan di Pulau Dewata, baik sebagai *event organizer* (EO) maupun sebagai pelaksana kegiatan. “Termasuk juga melibatkan para UMKM, jangan semuanya bawa dari Jakarta,” usul Nyoman.

Selain itu, Nyoman juga meminta sejumlah perusahaan BUMN, dalam hal ini PT Angkasa Pura dan maskapai Garuda Indonesia untuj mempersiapkan atau menambah jumlah penerbangan ke Bali. Menurutnya, saat ini Garuda Indonesia hanya beroperasi empat kali dalam sehari dan itu menurutnya tidak cukup, apalagi ketika menyambut libur Idulfitri 2022 nanti.

Nyoman juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan menunda rencana kenaikan harga BBM Peralite dan gas elpiji 3 kilogram. Menurutnya, perekonomian saat ini masih belum pulih apalagi setelah kenaikan harga minyak goreng. “Terutama sekali UMKM kita, kita tahu UMKM kita menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, oleh karena itu jangan naikan dulu atau tunda dulu kenaikan Peralite dan gas elpiji,” ujar Nyoman. ● ica,mcn,eki/es

Tinjau Kinerja PLN hingga Awasi Penambangan Pasir

Komisi VII DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengunjungi beberapa daerah di antaranya ke Jayapura untuk meninjau PLTMG Holtekamp 50 MW yang menjadi salah satu *base load* pada kelistrikan di Jayapura.

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Holtekamp 50 MW yang sudah mulai beroperasi ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati energi listrik yang merata hingga ke pelosok daerah serta mendukung pertumbuhan industri di daerah.

Saat memimpin Tim Kunker Komisi VII DPR RI di PLTMG Holtekamp 50 MW, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto memperoleh gambaran bahwasanya di sistem Jayapura ini terdapat surplus daya hingga 54MW. Untuk itu Sugeng berpesan agar kelebihan daya tersebut dikelola dengan bijak demi kepentingan masyarakat.

"Kita memperoleh gambaran, dari sisi ketersediaan listrik cukup. Bahkan ada cadangan lebih sekitar 54MW atau 51 persen, itu sudah termasuk tinggi. Hanya memang cadangan itu harus tersebar rata dan tidak di satu tempat saja," ujar Sugeng kepada **Parlementaria** di Jayapura, Papua, baru-baru ini.

Politisi fraksi Partai NasDem ini mengutarakan bahwasanya ke depan, Papua akan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia. Peralannya, cadangan sumber daya alam di Papua sangat banyak. Hal itu perlu ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia yang hebat dan tentu harus di-*support* dengan energi listrik yang memadai.

"Ada potensi energi yang besar dari (Sungai) Mamberamo, yakni sebesar 20giga. Memang hari ini

berpandangan bahwasanya ada tumpang tindih dalam tata kelola pertambangan pasir laut. Ia berharap permasalahan tersebut segera teratasi agar kepastian dari sisi ekonomi maupun lingkungan tidak menggantung.

"Antara (tata kelola) di Kementerian ESDM yaitu KKP ini harus diselesaikan satu suara. Dimana yang harus mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kami minta pemerintah satu sikap itu dengan Keputusan Presiden



Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto saat pertemuan di PLTMG Holtekamp 50 MW di Jayapura, Papua.

belum dibangun, karena *demand* di Papua masih sangat rendah. Nanti seiring dengan kemajuan masyarakat Papua, itu akan kita bangun segera, kita juga akan bangun industri-industri di Papua," ucap Sugeng.

Soroti Tata Kelola Tambang Pasir Laut

Di Batam, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam

yang ada sebelumnya," ujar Ridwan di Batam pertengahan Mei ini.

Ridwan mengusulkan adanya alternatif yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mampu mengakomodir pemberian kewenangan menteri kepada kepala daerah untuk menerbitkan IUP. "Sehingga dua kementerian tadi dapat memberikan rekomendasi saja sesuai lingkup kerja masing-masing," ungkapnya.

FOTO: ERMAN/PDT

Saat pertemuan dengan para kepala daerah di Kepri, Ridwan mendapatkan aspirasi bahwasanya proses tambang pasir laut berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar nelayan. Untuk itu, ia mengusulkan agar pemberian IUP harus diperlakukan seketat mungkin.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, banyak IUP yang sudah terbit hanya diperjualbelikan tanpa tindak lanjut kembali. Ridwan berharap persoalan tata kelola dapat segera diselesaikan agar, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan pemasukan negara, namun juga bagi pendapatan daerah dan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Soroti Ketergantungan Bahan Baku Impor PT Kalbe

Anggota Komisi VII DPR, Sartono menyoroti sejumlah aspek dalam perindustrian di Tanah Air, khususnya bagi PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals. Pertama, Sartono memaparkan bahwa ketergantungan industri dalam negeri terhadap impor bahan baku masih cukup tinggi.

Sartono menyampaikan ke depannya perlu dilakukan rapat lintas komisi dan kementerian, untuk



Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat pertemuan dengan para kepala daerah di Kepulauan Riau.

mendalami bagaimana respon dan solusi terhadap temuan-temuan tersebut karena dapat menghambat produksi dan kebutuhan di lapangan.

"Kami juga menemukan selain harga tinggi, tapi juga langka. Salah satunya nanti kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian karena terkait dengan salah satu bahan baku yang cukup banyak diimpor, yaitu susu," jelas Sartono ketika memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR dengan jajaran direksi PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, baru-baru ini.

Selain permasalahan impor, Sartono juga menyoroti permasalahan daya beli masyarakat yang cenderung menurun saat ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sartono menyampaikan, hal tersebut merupakan salah satu imbas dari terjadinya inflasi. "Dalam dua tahun ini pemerintahan agar fokus terhadap sektor-sektor tertentu guna mengatasi menurunnya daya beli masyarakat, khususnya terhadap produk pangan," papar Sartono.

Politisi Partai Demokrat itu juga mendukung PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals dalam berbagai program dan produk yang dihasilkan untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan stunting. Sartono meminta ada kerja sama lintas kementerian dan instansi untuk mengatasi masalah stunting di tanah air.

"Agar dilakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki kasus stunting sehingga dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi dan mengatasi stunting," papar Sartono.

Terakhir, Sartono juga meminta harus ada komposisi yang pas untuk kebutuhan pekerja atau pegawai di PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals. ●es,aha,ica/es



Anggota Komisi VII DPR Sartono saat bersama direksi PT Kalbe Morinaga Indonesia dan PT Kalbe Nutritionals di Karawang, Jawa Barat.

Tinjau Persiapan Pemberangkatan Jemaah Haji

Komisi VIII DPR RI melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M di Kanwil Kemenag. Komisi VIII ingin memastikan tidak ada kendala dalam pemberangkatan jemaah haji. Tak hanya terkait masalah haji, DPR ingin agar penanganan kenakalan anak ditangani dengan humanis.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menegaskan

bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji 2022 nanti, pihaknya berusaha merumuskan kebijakan haji tanpa adanya setoran tambahan bagi masyarakat. mengingat setoran tambahan sudah ditutupi oleh nilai manfaat yang tersalurkan melalui *virtual account* di rekening para jemaah yang telah melunaskan setorannya.

"Kita tahu bahwa kami telah memutuskan biaya haji sebesar Rp39,8 juta. Para jemaah haji telah melunasinya sebesar Rp35 jutaan dan sisanya jemaah haji tidak perlu untuk memberikan setoran tambahan karena itu sudah ditutupi atau dipenuhi oleh nilai manfaat yang



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily di Balikpapan, Kalimantan Timur.

tersalurkan melalui *virtual account* di rekening para jemaah yang telah melakukan setoran lunas," tuturnya di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, April lalu.

Ace menilai, Asrama Haji Balikpapan dalam menyambut musim haji nantinya harus benar-benar disiapkan. Mengingat asrama haji sempat dialihfungsikan menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 beberapa waktu lalu.

Disampaikan Ace, Asrama Haji Balikpapan merupakan tempat transitnya jemaah haji dari empat Provinsi yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan daerah-daerah lainnya. Ia berharap kesiapan asrama haji ini nantinya dapat mengedepankan aspek kesehatan, dimana harus dilakukan PCR/antigen bagi jemaah haji sebelum mereka memasuki dan menempati asrama haji tersebut.

"Dengan fasilitas yang ada, saya kira sudah sangat layak ya untuk dijadikan sebagai tempat (transit jemaah haji)," tukas Ace.

Kebijakan Arab Saudi harus Disosialisasikan

Saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Kakanwil Kemenag Kepri terkait pelaksanaan ibadah haji, Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina menerangkan. Kanwil Kemenag seluruh Indonesia saat ini harus menyosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi, agar dapat secara efektif agar dipahami oleh jemaah haji. Karena haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

"Kami menyadari ukuran sehat bukan dari umur usia, ukuran sehat itu adalah masing-masing jasmani. Dari (calon) jemaah banyak orang yang usia 80 tahun tetapi dia masih sehat dan banyak orang yang usia 40 tahun ternyata sudah memiliki penyakit. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menghargai otorisasi dari kebijakan pemerintah Saudi Arabia

FOTO:NDV/PDT

karena keputusan 65 tahun ini adalah keputusan dari Saudi Arabia," kata Selly.

Legislator dapil Jawa Barat VIII itu berharap dan meyakini dalam waktu cepat pandemi Covid-19 akan segera berakhir, dan berubah menjadi endemi. Dan kebijakan terkait ibadah haji ini hanya berlaku di tahun sekarang, sehingga jemaah yang berusia 65 tahun ke atas tidak perlu khawatir. Tahun lalu Arab Saudi hanya menerima 1000 jemaah, kemudian menjadi 60.000 jemaah dan sekarang menjadi satu juta Jemaah. Menurut Selly, bisa jadi calon jemaah usia 60 tahun ke atas bisa lagi berangkat, terbukti yang umrah tidak dikenai batasan usia.

"Umrah yang usia 80 tahun sampai 90 tahun saja bebas. Hanya untuk haji saja masih dibatasi 65 tahun. InsyaAllah mudah-mudahan di tahun depan tidak ada batasan usia, Saudi Arabia tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena memang persiapan haji yang betul-betul mereka anggap masih ibadah yang harus disempurnakan pelayanannya," pungkas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tersebut.

Penanganan Kenakalan Anak-Anak Harus Humanis

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan isu kejahatan



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto bertukar cendera mata saat kunjungan kerja di DIY

jalanan yang banyak melibatkan anak-anak serta remaja yang kembali marak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru-baru ini, turut menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI. Meski persoalan kenakalan anak tersebut harus ditangani secara serius, namun Komisi VIII DPR RI sebagaimana disampaikan Yandri mengimbau penanganan kenakalan anak tersebut tidak harus melalui pendekatan hukum melainkan pendekatan secara humanis.

Demikian disampaikan Yandri saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi DIY dalam rangka pengawasan, pembahasan anggaran, sekaligus untuk menyerap aspirasi

masyarakat terkait bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana, di Komplek Kepatihan Yogyakarta, DIY, April lalu.

"Isu kejahatan jalanan yang banyak melibatkan anak-anak serta remaja tentu menjadi perhatian serius Komisi VIII. Komisi VIII menegaskan persoalan anak tersebut harus ditangani secara serius, namun tidak melalui pendekatan hukum melainkan pendekatan secara humanis. Di antaranya melalui pembinaan dan pemberdayaan, sehingga tumbuh kembang anak bisa kita pertanggungjawabkan di masa yang akan datang," jelasnya.

Namun demikian, politisi Fraksi PAN tersebut menuturkan Komisi VIII DPR RI tetap mengapresiasi langkah taktis Pemerintah Provinsi DIY yang sudah memasuki tahap memperbanyak pusat kreativitas anak sampai tingkat kecamatan atau desa terutama melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang akan ada di tingkat provinsi atau kota, hingga kelurahan. Dengan tujuan agar DIY yang saat ini masih berstatus pelopor bisa berubah menjadi provinsi ramah anak dan layak anak. ● ndy, afr, ron/es



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Kepri di Batam

Perlu Kerja Bersama Atasi Stunting

Komisi IX DPR RI bersama BKKBN senantiasa mendorong terciptanya keluarga berencana, sejahtera dan bebas stunting. Tidak bisa sendirian, saat kunjungan kerja ke beberapa daerah, Komisi IX menekankan agar BKKBN meningkatkan sinergi lintas sektoral dalam mewujudkan

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, masih tingginya angka kasus stunting sebesar 22 persen di Provinsi Riau harus segera diupayakan untuk penyelesaiannya dengan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral, baik itu antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Pasalnya, tidak mungkin hanya mengandalkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang anggarannya terbatas, sedangkan banyak anggaran yang ada di kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Kementerian Sosial yang diperuntukkan untuk stunting.

"Menurut saya, karena anggaran stunting itu banyak dan tersebar juga di lintas kementerian/lembaga, maka perlu dikoordinasikan supaya programnya juga bisa maksimal dalam membantu Provinsi Riau

untuk dapat segera mengatasi angka stunting yang ada di pekanbaru dan juga provinsi-provinsi yang lain," ujar Mufida saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, April lalu.

Menurut politisi PKS ini, dalam pengentasan stunting, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah perhatian terhadap kader-kader pendamping yang memang bekerja secara *real* dari rumah ke rumah untuk memberikan penyuluhan serta edukasi terhadap penyadaran pentingnya untuk memperhatikan gizi anak dan hal-hal yang perlu dicegah supaya tidak terjadi kelahiran anak stunting.

"Teman-teman kita dari tim pendamping keluarga dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) harus selalu diperhatikan kesejahteraannya, karena bagaimanapun mereka sebagai ujung tombak yang berjuang di lapangan. Bagaimana mereka

mengedukasi pencegahan agar anak tidak terkena stunting maupun cara mengatasi anak-anak yang terkena stunting dengan cara meningkatkan kesehatan dan gizinya," pesan Mufida.

Maksimal peran PIK-Remaja

Di Maluku Utara, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti masih tingginya angka kelahiran di tingkat usia remaja usia 15 hingga 17 tahun. Karena secara medis melahirkan di usia dini berpotensi melahirkan bayi dengan kondisi stunting. Untuk itu perlu dimaksimalkan peran dari wadah Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) guna mencegah hal tersebut.

"Saya merasa ini harus segera diantisipasi dan dicegah jangan sampai tren ini semakin naik, sehingga arah tujuan jangka panjang kita menuju Indonesia emas 100 tahun itu yakni menuju Indonesia yang sejahtera, bahagia, negara maju, negara besar



Mufida saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau.

FOTO: JKA/PTI



FOTO: CAS/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memberikan masukan dalam kunjungan kerja di Ternate, Maluku Utara.

itu tidak akan bisa terwujud," kata Nurhadi di Ternate, Maluku Utara.

PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Di samping itu, peran pendampingan orang tua menjadi palang pintu utama agar remaja ini tidak terjerumus pada pergaulan bebas atau kegiatan-kegiatan yang negatif.

"Mereka para remaja setuju dengan meningkatkan peran daripada PIK-R secepatnya agar pihak orang tua tahu apa yang dihadapi oleh anak-anaknya. Terkadang orang tua punya kesibukan masing-masing dan abai terhadap masalah anak-anaknya sehingga mereka merasa tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat untuk menceritakan masalah dalam hidupnya kemudian yang terjadi keputusan akhirnya jatuh ke pergaulan bebas, narkoba dan lain-lain," jelas Nurhadi.

Soroti Standar Pelayanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai *Universal Health Coverage* (UHC) masyarakat

daerah tidak bisa dinikmati layaknya masyarakat kota. Menurutnya bidang kesehatan di Kalimantan Tengah perlu difokuskan lagi, baik SDM maupun infrastruktur. Mengingat Kalteng akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru, termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun, masyarakat Kalteng sulit untuk menikmati standar pelayanan kesehatan yang layak.

"Masalahnya adalah keterbatasan SDM, infrastruktur, baik rumah sakitnya maupun SDM tenaga dokter,

perawat dan sebagainya. Di lain pihak, UHC masyarakatnya juga sangat tinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus, agar kebutuhannya itu merata, seperti penambahan dokter spesialisnya, kemudian infrastruktur puskesmas atau rumah sakit rawat inap," tutur di Palangka Raya, Kalteng.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menerangkan bahwa nantinya sistem pelayanan kesehatan BPJS itu hanya akan ada satu kelas, yaitu Pelayanan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Hal ini sekaligus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk masyarakat kurang mampu.

"Kami dari awal masuk ke Komisi IX jujur cukup berdarah-darah. Kenapa? Ketika ada rencana kenaikan iuran BPJS, terutama untuk orang yang kurang mampu, akan dibayarkan oleh pemerintah daerah juga. Nah, pemerintah, terutama kami diskusi dengan Kementerian Kesehatan juga, bahwa dengan adanya inflasi itu, nantinya bakal ada rencana ketika semuanya sudah distandarisasi, biaya BPJS itu sendiri turut naik, yang mana tidak ada kelas satu dan kelas dua lagi," tandas legislator dapil Bali itu.

● jk,cas,dip/es



FOTO: DIP/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana saat berpendapat dalam kunjungan kerja di Palangkaraya, Kalteng.

Serap Aspirasi bidang Olahraga hingga Merdeka Belajar

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah, untuk menyerap aspirasi terkait lingkup kerjanya seperti olahraga, pendidikan juga UMKM. Dibidang olahraga, Komisi X ingin mengetahui sejauh mana efektifitas penerapan UU 11 Tahun 2022.

Setelah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Komisi X DPR RI

ingin mengetahui efektifitas dan penerapan undang-undang tersebut dalam keolahragaan Provinsi Jawa Barat, termasuk aspirasi terkait keolahragaan di daerah tersebut.

"Lahirnya Undang-Undang tersebut, diharapkan dunia olahraga Indonesia dapat lebih maju dan berkembang, baik olahraga prestasi, olahraga masyarakat, maupun olahraga pendidikan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil beberapa waktu yang lalu.

Politisi fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa penguatan olahraga sebagai bagian dari SDGs, dan penguatan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

olahragawan sebagai profesi, pengaturan disain besar olahraga nasional dan disain olahraga daerah, serta adanya pengaturan dana perwalian olahraga.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa terkait olahraga prestasi, di Jawa barat bisa dikatakan sebagai daerah yang paling unggul dalam pembinaan atletnya. Berbagai prestasi ditorehkan oleh atlet Jawa barat diantaranya sebagai juara PON (Pekan olahraga nasional) selama tiga kali berturut-turut, juara umum paralimpic, juara pekan pesantren, serta selama tiga tahun berturut-turut menjadi juara dalam ajang Perkan olahraga Korpri nasional, serta berbagai ajang olahraga nasional lainnya.

Program MBKM Harus Detail

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan bahwa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diterima dengan baik, namun beberapa catatan-catatan harus diperhatikan dan menjadi evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baru. Salah satunya kegiatan belajar di luar kampus dan di luar prodi selama 3 semester harus didetailkan sehingga tidak merusak kompetensi utama.

"Kalau 3 semester dikonversi menjadi sks maka akan mencapai 60 SKS, padahal kan S1 itu 140-150 SKS, itu kan berarti tinggal sekitar 80-90 SKS. Kalau 80 SKS maka kompetensi utama sangat disanksikan. Ini yang perlu mendapat

kajian yang komprehensif dari Kemendikbudristek,” ungkap Fikri di Surabaya, Jawa Timur.

“Belajar 3 semester di luar prodi, perlu didetailkan sehingga tidak merusak kompetensi utama atau *mayor competence*. Kalau kemudian nanti menjadi *minor competence* memang bebas, namun harus terukur karena ada yang mengambil mata kuliah lain yang di luar prodi tetapi di perguruan tingginya sendiri mengalami kesulitan ketika dikonversikan menjadi SKS,” sambung Fikri.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa perlu kesamaan pandangan baik dari Kemendikbudristek hingga perguruan tinggi, sehingga hal teknis ini bisa dicarikan solusinya, karena sesungguhnya program MBKM ini sudah diterima dengan baik namun catatan-catatan yang ada harus menjadi perhatian.

“Kemendikbudristek juga harus melakukan sosialisasi pelaksanaan Program MBKM secara detail, jelas, sederhana dan berkelanjutan sehingga kebijakan ini bisa dipahami dari tingkat konsep sampai dengan teknis pelaksanaan. Konsep MBKM ini yang dikembangkan Kemendikbudristek bisa menjadi pedoman penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) handal, yang sudah tertuang dalam Rencana



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur.

Strategis Kemendikbudristek tahun 2020-2024,” tandas Fikri.

Apresiasi Pemandahan PKL di Malioboro

Relokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang tidak menimbulkan masalah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Ia mengapresiasi relokasi pedagang yang semula berada di emperan Malioboro ke tempat yang lebih layak dan bagus.

“Dari kunjungan ke Teras 1, saya sempat berdiskusi dengan para penjual. Para pedagang mereka

merasa lebih nyaman di tempat yang baru dan mereka merasa tidak tergesur tapi mereka berpindah dengan sukarela dan mereka menemukan tempat yang lebih baik,” kata Andreas Hugo Pareira saat mengikuti kunjungan kerja Komisi X DPR RI meninjau Teras 1 Malioboro, di Yogyakarta.

Lebih lanjut Andreas menerangkan bagaimana model pemindahan PKL seperti ini juga bisa menjadi contoh untuk daerah yang lain. Karena menurutnya banyak daerah yang sampai sekarang tidak berhasil dalam memindahkan PKL dari satu lokasi yang ke lokasi yang lain dan seringkali menimbulkan konflik di antara PKL dengan Satpol PP. Sehingga kemudian ini dapat menimbulkan persoalan persoalan konflik dan menggagalkan proses pemindahan tersebut.

Politisi PDI-Perjuangan ini menginginkan hal tersebut bisa menjadi *role model* bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah untuk mendukung program penataan PKL seperti di Yogyakarta, sehingga baik untuk tata kota dan menguntungkan untuk pedagang maupun pembeli. Termasuk untuk kenyamanan untuk pelaku pariwisata dan wisatawan.

● ayu,skr,man/es



Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira saat meninjau Teras 1 Malioboro, di Yogyakarta.

Soroti Inflasi, PEN hingga Pengawasan Bea Cukai di Perbatasan

Komisi XI DPR RI dalam rangkaian kunjungan kerja menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di beberapa daerah. Diantaranya, terkait inflasi di Sulawesi Selatan, PEN di Kalimantan timur serta pengawasan terhadap bea cukai di Batam Kepri.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 tercatat 4,65 persen (year of year), tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sebesar 3,69 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu di Sulsel secara umum di atas rata-rata nasional. Namun ia mengakui, di tengah pergerakan masyarakat yang semakin dilonggarkan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel akan berdampak pada meningkatnya angka inflasi.

"Sehingga kalau inflasi di Sulsel ini tumbuh di atas rata-rata nasional, atau tumbuh di tahun sebelumnya, masih dalam kendali di APBN kita di 3 ± 1 persen. Saya kira apa yang terjadi di Sulsel ini gambaran bahwa memang pergerakan ekonomi Sulsel ini tumbuh dan hidup. Sehingga



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat pertemuan Kunker Komisi XI di Kota Makassar, Sulsel.

inflasi ada kenaikan dibanding tahun 2020," kata Amir usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja guna memantau pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi Sulsel, di Kota Makassar, Sulsel, April lalu.

Politisi Fraksi PPP itu menambahkan, terkendalinya inflasi di Sulsel karena peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten/kota. Kemudian terkait pertumbuhan ekonomi, Amir mengakui sektor pertanian memberi kontribusi cukup tinggi.

"Kalau pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memberikan perhatian yang serius melalui anggaran ke sektor pertanian pasti akan berpengaruh secara signifikan. Kalau tidak salah sekitar 40 persen

sektor pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," tandas legislator dapil Sulsel I itu.

Soroti Program PEN di Kaltim

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan menyoroti pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19 di Kalimantan Timur yang tengah dilakukan mitra kerja dalam mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Saat ini, jelas Fathan, selain sebagai upaya untuk melakukan penyelamatan sektor kesehatan dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, vaksinasi, dan pengendalian pandemi, pemerintah juga tengah memfokuskan program PEN terhadap pemulihan perekonomian nasional



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan di Balikpapan, Kaltim.

khususnya UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

"Selain penanganan untuk kesehatan pemerintah juga menjalankan program pen sebagai respon atas masyarakat yang terdampak pada ekonominya khususnya sektor informal atau UMKM," ungkap Fathan saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Balikpapan, Kaltim.

Berdasarkan laporan perekonomian didapat Komisi XI DPR RI, pada Februari tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kaltim diprediksi akan terus memperlihatkan proses pemulihan, dengan perkiraan pertumbuhan pada rentang 2,95-3,75 persen (yoy).

Seluruh mitra kerja Komisi XI yang hadir juga menyampaikan bahwa rangkaian program PEN dalam rangka pemulihan sektor ekonomi dan UMKM pasca pandemi Covid-19 yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi di Kaltim telah berjalan dengan baik.

Terkait hal tersebut, Fathan mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi, tidak dijadikan alasan untuk melupakan masalah utama yang terjadi akibat pandemi

Covid-19 yaitu kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi hingga kini.

Perketat Pengawasan Bea Cukai

Sejak tahun 2020 hingga 15 April 2022, Bea Cukai Batam mencatat telah melakukan 1.144 tindakan penindakan yang diantaranya terkait peredaran rokok ilegal, minuman beralkohol, dan narkoba. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan penindakan dalam rangka memperketat pengawasan di wilayah perbatasan.

"Upaya pengawasan dan penindakan perlu digiatkan untuk mencegah pelanggaran hukum dan hilangnya potensi penerimaan negara di sektor kepabeanaan. Apalagi mengingat posisi Kepulauan Riau yang sangat strategis karena berada di jalur perairan internasional yang sibuk dan berhadapan langsung negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia," kata Puteri di Batam, Kepulauan Riau.

Hal itu menurut Puteri merupakan tugas Bea Cukai Batam sebagai *community*

protector yang dibuktikan melalui serangkaian penindakan atas pelanggaran kepabeanaan dan cukai. Dalam hal ini, Puteri juga mendorong Bea Cukai Batam untuk mengoptimalkan peran Batam Logistics Ecosystem (BLE) untuk tingkatkan penerimaan negara. Hal itu diutarakannya menyikapi keberhasilan penerimaan Bea Cukai Batam yang mencapai Rp221,99 miliar atau sekitar 213,95 persen dari target pada triwulan I-2022.

"Pengembangan BLE tentu bermanfaat untuk penyederhanaan proses bisnis dan layanan, kolaborasi sistem layanan dan logistik, serta kemudahan setiap transaksi pembayaran ke penerimaan negara. Dengan begitu, harapannya, Bea Cukai Batam bisa mengejar target penerimaan tahun 2022, atau bahkan bisa melebihinya," tegas Puteri.

Politisi Partai Golkar ini juga mengusulkan agar pemerintah meninjau efektivitas pemberian insentif kepabeanaan pada kawasan khusus di Kepulauan Riau, seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, KEK Batam Aero Technic, dan KEK Nongsa. ●sf,rr,srw/es



Tim Kunker Komisi XI DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Batam, Kepulauan Riau.

Untung-Rugi Larangan Ekspor CPO

Beberapa bulan terakhir, bangsa Indonesia disibukkan dengan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Meskipun ada, harganya diluar jangkauan masyarakat kelas menengah ke bawah. Beberapa kebijakan harus segera diambil pemerintah guna menstabilkan harga minyak goreng.

pemerintah sendiri pernah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menekan harga minyak goreng di pasaran. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya dengan diterbitkannya aturan *Domestic Price Obligation* (DPO) dan *Domestic Market Obligation* (DMO) serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), hingga diberlakukannya larangan ekspor CPO dan turunannya.

Melihat berbagai kebijakan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menilai pemerintah harus memiliki parameter dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

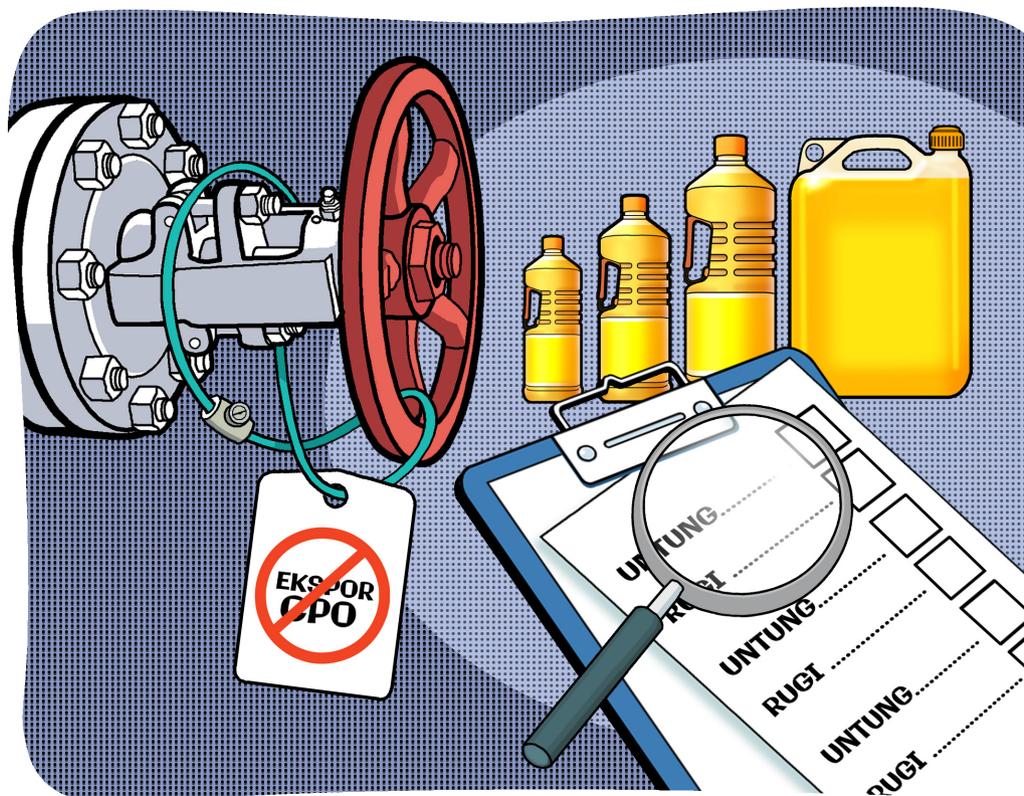
Sehingga nantinya kebijakan tersebut tidak hanya merupakan solusi jangka pendek, sebab yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan minyak goreng adalah solusi jangka menengah dan jangka panjang.

"Apa parameternya nanti untuk mempertahankan, melarang dan mencabut larangan? Nah, tadi kalau misal untuk subsidi BLT udah dikasih ternyata harga enggak turun, larangan juga sudah dikeluarkan ternyata harga enggak turun, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Larangan (ekspor CPO) jangan hanya sekedar larangan tanpa kita mencari sesuatu yang sistemik yang menyeluruh, maka ini harga nggak akan bisa terkoreksi ke bawah. Jadi solusi jangka pendek nggak ada kalau dari pandangan saya, yang ada solusi jangka menengah dan jangka panjang," katanya kepada **Parlementaria**.

Pada April 2022, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 resmi melarang sementara ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), *Bleached and Deodorized Palm Oil* dan *Used Cooking Oil*. Kebijakan ini dibuat guna menekan harga minyak goreng curah di dalam negeri yang terus naik sejak akhir tahun 2021 hingga menyentuh angka Rp21.000 per liter pada akhir April 2022.

Kebijakan pelarangan ekspor tersebut sempat menimbulkan pro kontra hingga protes dari petani sawit yang merasa dirugikan. Menurut hitungan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), para petani sawit sudah rugi Rp11,4 triliun sejak diberlakukannya larangan tersebut.

Sementara itu, sejak naiknya harga minyak goreng di pasaran,



Terlebih, Indonesia merupakan pemain besar di industri sawit, untuk itu segala kebijakan terkait sawit perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari masyarakat, petani sawit, hingga pengusaha.

"Kebijakan ekspor kelapa sawit perlu dikaji ulang. *Nah*, dikaji ulang itu mencari solusi jangka menengah, karena kita pemain besar di industri sawit, kita *supply* dunia. Jadi kalau masyarakat bilang '*wah ini tidak pro rakyat, harga tinggi*'. Semua dirugikan, mulai dari rakyat, petani sampai pengusaha, lainnya juga dirugikan, minimal

nol dua-duanya, kita nggak terima. Di dalam (negeri) juga nanti ada orang transaksi biasa kan ada PPN 11 persen. Kita bisa hitung, tahun lalu penerimaan berapa, dikurangi yang sekarang yang sudah sempat terkutip Januari sampai Maret sebelum pelarangan, itulah kita punya APBN akan turun dengan angka seperti itu," paparnya.

Kedua, kemungkinan munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan di sektor sawit disebabkan oleh berkurangnya produksi minyak kelapa sawit. "Kalau berkelanjutan terus, PHK mungkin akan terjadi. Kalau kemarin misalnya



OJI/PDT

“

Larangan (ekspor CPO) jangan hanya sekedar larangan tanpa kita mencari sesuatu yang sistemik yang menyeluruh, maka ini harga nggak akan bisa terkoreksi ke bawah. Jadi solusi jangka pendek nggak ada kalau dari pandangan saya, yang ada solusi jangka menengah dan jangka panjang.

Sihar Sitorus
Anggota Komisi XI DPR RI

yang tidak terbukti melakukan pelanggaran," jelas politisi PDI-Perjuangan ini.

Menurut Sihar, pelarangan ekspor CPO sejak akhir April 2022 tersebut jika berlangsung dalam jangka panjang akan menimbulkan berbagai resiko. Pertama, kerugian negara sebab pendapatan dari ekspor terhenti.

"Selama ini kan kalau ekspor ada pajak ekspor dan bea keluar, berarti kalau enggak ada ekspor ini

orang kerja dua *shift*, tiga *shift*, karena sekarang 40 persen udah nggak butuh banyak orang. Terjadilah PHK sementara karena tadinya produsen ini produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri, karena luar negerinya nggak ada, maka dia hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Rentetannya PHK orang akan minta bantuan pemerintah, subsidi kan, beban negara lagi, jadi efeknya banyak," tegasnya.

Larangan Ekspor Kembali Dibuka

Merespon berbagai pro kontra dari kebijakan larangan ekspor CPO, pada 19 Mei 2022, Presiden Joko Widodo akhirnya kembali mengumumkan dibukanya kembali ekspor CPO dan turunannya berlaku sejak 23 Mei 2022. Kebijakan tersebut direspon positif oleh berbagai kalangan. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memberikan dukungan penuh dan mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang dinilai merupakan *win-win solution*.

"Kami di Komisi VI memberikan dukungan penuh terhadap langkah presiden, karena itu adalah solusi *win-win* bagi pemerintah untuk menyelamatkan nasib petani sawit yang 16 juta orang. Pemerintah menangkap dan menampung aspirasi petani sawit lalu pemerintah mengeksekusi dengan mencabut larangan ekspor," ujar Andre ketika ditemui **Parlementaria**.

Setelah dibukanya kembali keran ekspor tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) diharapkan tetap tegas memastikan minyak goreng tersedia dengan harga yang terjangkau di tengah-tengah masyarakat.

Andre mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap tegas memastikan berbagai peraturan yang telah diatur dapat dijalankan dengan baik. Serta terus melakukan konsolidasi dengan pengusaha-pengusaha sawit agar menjalankan Permentan No. 1 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebunan, guna memastikan perlindungan kepada petani sawit dengan harga TBS yang layak.

"Solusinya hanya satu ketegasan pemerintah melawan oligarki," tegasnya. ● **bia/es**

Jadi Satgas IPU, Fadli Zon Dorong Langkah Diplomasi Konflik Rusia-Ukraina



JAKA/PDT

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon.

Sejak invasi dimulai 24 februari lalu, pasukan rusia secara perlahan-lahan mulai menarik diri dari ibukota kiev dan wilayah utara ukraina dan peperangan saat ini terkonsentari di wilayah timur Kherson, serta wilayah Donbas yang mencakup Kota Mariupol, Donetsk, dan Luhansk. Wilayah Donbas dianggap sebagai basis kelompok separatis pro-rusia.

Beberapa lembaga penelitian termasuk Institute for the Study of War (ISW), lembaga riset berbasis di UK, memperkirakan Rusia saat ini akan fokus mengontrol kota-kota di sekitar Crimea (termasuk kota Odessa) dan Donbas yang notabene merupakan basis kekuatan kelompok separatis. Odessa dipandang strategis karena merupakan pelabuhan terpenting Ukraina dan menjadi akses utama Ukraina menuju Laut Hitam.

DPR RI kembali ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian bagi konflik Rusia-Ukraina melalui keterlibatan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam Satuan Tugas Organisasi Parlemen Dunia/Inter-Parliamentary Union (IPU) Task Force. Satgas ini dibentuk atas dorongan serta inisiatif BKSAP DPR RI dalam perhelatan Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua pada akhir Maret lalu.

"Dalam pertemuan pertama IPU Task Force tanggal 25 April 2022 kemarin, saya mendesak agar perwakilan parlemen dunia segera melakukan langkah-langkah diplomasi konkret untuk mencegah peperangan mencapai eskalasi yang tidak diinginkan," jelas Fadli dalam siaran pers yang diterima **Parlementaria**, Kamis (28/4).

Satgas IPU beranggotakan delapan orang yang mewakili enam Grup Geopolitik, yaitu Afrika Selatan dan Namibia sebagai wakil Grup Afrika, Uni Emirat Arab mewakili Grup Arab, Indonesia mewakili Grup Asia Pasifik, Kazakhstan mewakili Grup Eurasia, Uruguay sebagai wakil untuk Grup Amerika Latin dan Karibia, serta Belanda dan Israel sebagai wakil Grup Twelve Plus yang meliputi wilayah Eropa Barat.

Pada pertemuan pertama yang dilakukan secara virtual tersebut terdapat beberapa agenda antara lain, pembentukan organisasi kerja, rencana agenda kerja termasuk rencana kunjungan, dan jadwal pertemuan hingga aspek-aspek lain yang akan mendukung kerja Satgas. Menurut Fadli, hasil kerja Satgas IPU nantinya menjadi ujian bagi efektivitas diplomasi parlemen sebagai bagian dari diplomasi total.

Lebih lanjut, Anggota Komisi I DPR RI tersebut menyatakan bahwa

“

Kita tentunya berharap agar langkah diplomasi Organisasi Parlemen Dunia ini bisa menjadi bagian signifikan dari upaya mencapai penyelesaian politik

Fadli Zon
Ketua BKSAP DPR RI



RSB/PDT

agar berfungsi dengan baik, Satgas IPU harus bisa mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak, yaitu Rusia dan Ukraina, sehingga pembicaraan tripartit antara Satgas IPU, Parlemen Rusia, dan Parlemen Ukraina bisa menghasilkan kesepakatan yang berarti.

"Kita tentunya berharap agar langkah diplomasi Organisasi Parlemen Dunia ini bisa menjadi bagian signifikan dari upaya mencapai penyelesaian politik. Jangan sampai konflik tersebut menjerumuskan kita pada dua bencana yang sangat tidak diharapkan tadi, yaitu Perang Dunia III dan Perang Nuklir," tandas politisi Partai Gerindra tersebut.

Dalam gelaran Sidang Majelis IPU ke-144, BKSAP DPR RI sebagai delegasi parlemen RI mengusulkan resolusi damai atas konflik di Ukraina. Pada kesempatan tersebut kemudian disepakati resolusi berjudul "Peaceful Resolution of the War in Ukraine, Respecting International Law, the Charter of the United Nations and Territorial Integrity" yang merupakan komitmen parlemen dunia untuk terlibat langsung dalam mendorong penyelesaian damai antara Rusia dengan Ukraina.

Sebagai pengusul terbentuknya Satgas, Fadli yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini juga menekankan bahwa Satgas IPU harus bersifat imparisial dan netral agar dapat bekerja secara objektif untuk mengakhiri perang, de-eskalasi konflik, membuka koridor kemanusiaan, serta tercapainya kesepakatan damai.

Seperti yang diketahui hingga 10 Mei 2022, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan kematian warga sipil sebanyak 3.381 orang dan melukai sekitar 3.680 (UN Human Right Mission). Lebih dari itu, UN juga memperkirakan sebanyak 5,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina dan menjadi pengungsi di beberapa negara sekitar sedangkan lebih dari 6,5 juta orang tersingkir dari tempat tinggalnya di Ukraina. ●

“

Satgas IPU harus bersifat imparisial dan netral agar dapat bekerjasecara objektif untuk mengakhiri perang, deskalasi konflik, membuka koridor kemanusiaan serta tercapainya kesepakatan damai

Fadli Zon
Ketua BKSAP DPR RI



RSB/PDT



Daerah Pemilihan (DAPIL)



Sudin: Serap Aspirasi Petani di Candipuro Lampung Selatan

“Saya turun menemui masyarakat hari ini, tujuan saya cuma satu yaitu untuk mendengar aspirasi rakyat dan hal itu sudah menjadi tugas kami ini sebagai perwakilan bapak-ibu semuanya”

Anggota DPR RI Sudin melakukan reses di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, akhir April lalu. Dalam kegiatan tersebut, Sudin menyerap aspirasi masyarakat mengenai produktivitas pertanian di daerah Lampung Selatan.

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Taman dan Sulastiono, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung Deddy Candra dan Donald Harris Sihotang, dan juga Kepala BPTP Lampung Jackvy Hendra beserta pejabat terkait.

Dalam sesi serap aspirasi, masyarakat Kecamatan Candipuro berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Sudin. Masyarakat juga memohon beberapa bantuan berupa alat dan mesin pertanian untuk mendukung produktivitas di bidang pertanian.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin ini berjanji akan memberikan alat mesin pertanian dan akan segera datang

setelah Idul Fitri. Alat yang dijanjikan Sudin berupa 12 unit *hand tractor*, 22 unit *hand sprayer* dan 22 mesin pompa air. Selain itu juga ada bantuan berupa jalan usaha tani yang akan menyusul.

“Bantuan ini akan datang setelah lebaran, jadi untuk mempercepat mohon secepatnya dibuatkan proposal. Nanti tolong Pak Kepala Desa dibantu masyarakatnya buatkan proposal,” kata politisi dapil Lampung 1 tersebut.

Sudin berharap dengan bantuan yang diberikan bisa memajukan memajukan usaha tani masyarakat setempat. “Saya harap bantuan ini bisa bermanfaat, bisa membuat usaha bapak dan ibu maju. Nanti dibuatkan pembukuan dengan baik agar lebih bagus,” imbuhnya.

Sudin juga mendorong supaya para ibu-ibu aktif melakukan kegiatan yang dapat membuahkan hasil dan membantu keluarga seperti mendirikan kelompok wanita tani. Dalam kelompok itu, para ibu-ibu dapat bertani bersama-sama dan juga nantinya bisa mendapat bantuan permodalan dari pemerintah supaya lebih berkembang.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto juga berterima kasih karena Sudin selalu menyerap aspirasi dari daerah dan disuarakan secara vokal di pusat.

Nanang berharap, reses yang digelar di Desa Sinar Pasemah itu dapat benar-benar memiliki dampak yang baik terhadap kabupaten Lamsel khususnya bidang pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kelautan yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI. ●ann/es



Anggota DPR RI Sudin menyerap aspirasi dari masyarakat Candipuro, Lampung Selatan.

FOTO:IST/PDI

Lamhot Sinaga:

Buka Lahan Tidur untuk Komoditas Unggulan di Humbahas

“Kawasan Danau Toba memiliki potensi besar menjadi sentra penghasil jagung. Karena punya sejarah sejak dari nenek moyang yang terdahulu sudah menjadi tradisi menanam jagung”

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga dalam agenda reses ke nmnmk II tahun sidang 2021/2022 melakukan kunjungan di dapil Sumatera Utara II, termasuk ke Kecamatan Lintong Nihuta untuk membagikan bantuan CSR BRI 50 unit Pemipil Jagung kepada 50 kelompok tani se-Humbang Hasundutan senilai Rp910 juta rupiah di Kantor Camat Lintong Nihuta.

“Tanaman jagung cukup bagus ditanam di sekitar Danau Toba. Apalagi sejak pemerintah menyetop impor jagung, harga jual jagung ditingkat petani sangat stabil dan harganya cukup bagus. Kondisi ini bisa meningkatkan semangat petani untuk bertanam jagung,” ungkapnya.

Meski begitu Lamhot berharap agar para petani tidak mengalihkan lahan padi, kopi dan hortikultura lainnya menjadi lahan untuk tanaman jagung. Lamhot Sinaga berharap, meski tanaman jagung ini sangat menjanjikan, sebaiknya lahan untuk



FOTO: IST/PDT

Anggota DPR RI Lamhot Sinaga saat mengendarai traktor sebelum diserahkan kepada masyarakat.

tanaman jagung yang digunakan adalah lahan-lahan tidur yang masih cukup luas di Humbang Hasundutan.

“Dengan adanya tanaman idola baru, jagung, sebaiknya menambah jumlah komoditas unggulan di humbahas, bukan menggantikan komoditas lama seperti padi, kopi yang sudah terkenal dan hortikultura lainnya. Tetapi benar-benar menambah komoditas unggulan ditingkat petani. Dengan demikian, tercapailah peningkatan

kesejahteraan petani Humbang Hasundutan,” papar Lamhot.

Lebih lanjut Lamhot Sinaga juga memberikan Traktor untuk KUD di Lintong Nihuta, hasil inisiasinya dari PT PLN. “Traktor ini sebagai bentuk dukungan untuk pembukaan lahan-lahan pertanian baru agar bisa dikerjakan dengan lebih luas. Dengan Traktor, masyarakat mampu mengerjakan lahan yang jauh lebih luas dibanding tenaga manusia dalam mengolah lahan,” ujarnya. ● [we/es](#)

Suir Syam: Sosialisasikan Upaya Pencegahan Stunting

“Terjadi kekurangan gizi secara terus menerus termasuk pertumbuhan tinggi badan tidak sesuai standar ukuran dengan usia yang normal, tingkat intelektual kecerdasan rendah, itulah ciri-ciri dari stunting”

Pepatah mengatakan ‘lebih baik mencegah daripada mengobati’ hal itu juga berlaku dalam penanganan stunting di Indonesia. Ikut andil dalam upaya pencegahan stunting, Anggota Komisi IX DPR RI, Suir Syam menghadiri sosialisasi program Bangga Kencana yang selenggarakan oleh BKKBN di Padang Panjang, Sumatera Barat.

Istilah stunting mulai mencuat di masyarakat pada beberapa tahun ke belakang dan seolah terus menghantui anak-anak Indonesia. Kondisi stunting tak hanya berhubungan dengan kondisi fisik namun, dapat memberikan dampak pada mental dan intelegensi.

Kasus stunting menjadi sorotan karena menjadi batu sandungan dalam tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), oleh karena itu penurunan prevalensi stunting pada balita pun menjadi agenda penting berbagai pihak.

Salah satu langkah yang diambil adalah menyosialisasikan informasi yang dapat mencegah terjadinya stunting seperti Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diinisiasi oleh BKKBN.

Legislator Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa sosialisasi yang dilakukan di daerah



FOTO: IST/PDT

Anggota DPR RI Suir Syam menyosialisasikan upaya pencegahan stunting.

pemilihannya ini merupakan salah satu wujud keseriusan Komisi IX DPR RI dan BKKBN untuk melaksanakan visi dan misi program Bangga Kencana.

Mantan Walikota Padang Panjang ini mengingatkan bahwa masih ada beberapa target di tahun 2022 yang belum tercapai sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai percepatan program dan kegiatan prioritas.

“Ini tidak hanya pada level pemerintah provinsi saja, tetapi justru bagaimana implementasi di ujung tombak, di lini lapangan yang secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya. Suir Syam juga

mengingat pentingnya perencanaan kehamilan dan pemantauan gizi bagi ibu hamil dan balita sebagai salah satu langkah pencegahan stunting. ● uc/es

Syarief Abdullah Alkadrie:

Resmikan Balai Kesenian di Kubu Raya

“Dengan rampungnya pembangunan ini, tentunya akan menjadi penunjang aktivitas dan kreativitas seni budaya masyarakat di Desa Sungai Deras”



Anggota DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat diarak menunggangi sisingaan

Anggota DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie meresmikan Balai Kesenian di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Balai Kesenian ini merupakan Program Pembangunan dari Kementerian

“Masyarakat dan pemerintah desa harus saling mendukung, baik dari tokoh masyarakat dan sebagainya

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun Anggaran 2021. Program ini merupakan hasil aspirasi Syarief sebagai wakil rakyat dapil Kalimantan Barat I.

Dalam acara peresmian Balai Kesenian ini, Syarief Abdullah disambut hangat dengan diarak menunggangi Sisingaan oleh masyarakat Desa Sungai Deras menuju lokasi acara Peresmian balai kesenian.

Acara peresmian Balai Kesenian itu pun ditandai dengan pemotongan pita didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya Jakariansyah, Kepala Desa Sungai Deras Syahrus Siyam, dan disaksikan puluhan tokoh masyarakat serta beberapa kepala desa kecamatan Teluk Pakedai dan Sungai Kakap.

Syarief mengapresiasi Kemendes PDTT yang telah membantu membangun Balai Kesenian tersebut. Ia juga berharap seluruh program yang telah disusun untuk Balai Kesenian Desa Sungai Deras dapat dilaksanakan dengan baik.

“Masyarakat dan pemerintah desa harus saling mendukung, baik dari tokoh masyarakat dan sebagainya. Dengan pembangunan ini akan membawa dampak perubahan dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Sungai Deras Syahrus Siyam, berterima kasih kepada Kemendes PDTT dan juga Syarief Abdullah atas pembangunan Balai Kesenian di desanya.

“Saya atas nama pemerintah Desa Sungai Deras mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang telah ditunaikan. Secara manfaat, Balai Kesenian ini untuk menciptakan dan menggali bakat dan kreativitas anak-anak. Mudah-mudahan bantuan ini berkah dan bermanfaat untuk masyarakat,” ucapnya. ● gal/es

Dedi Wahidi: Bantu Lansia dan Penyandang Disabilitas

“Dengan adanya alat bantu seperti kursi roda, masyarakat yang mengalami sakit bisa melakukan aktifitas di luar rumah. Sehingga dapat kontak dengan sinar matahari atau bisa berjemur di pagi hari”

Anggota DPR RI Dedi Wahidi memberikan bantuan berupa kursi roda dan alat bantu lainnya bagi masyarakat di dapilnya Kabupaten Indramayu. Bantuan ini khusus diberikan kepada sejumlah masyarakat yang lanjut usia (lansia) menderita struk juga kepada disabilitas.

Ada sebanyak 21 kursi roda dan tongkat penyangga di bagikan ke enam desa di Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu. Diantaranya di Desa Larangan Jambe 6 unit, Jambe 7 unit, Tenajar Kidul 1 unit, Tenajar Tengah 4 unit, Kliwed 2 unit dan Sukawera 1 unit.

Bantuan ini merupakan diinisiasi Dedi Wahidi bekerjasama dengan



Anggota DPR RI Dedi Wahidi memberikan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Indramayu.

FOTO: IST/PDI

“

kegiatan pembagian kursi roda ini atas kepeduliannya sendiri sebagai Anggota DPR-RI kepada masyarakat yang membutuhkan. Dirinya melihat banyak masyarakat yang dalam kondisi sakit dan sangat memerlukan alat bantu kursi roda serta alat bantu lainnya.

Total sudah ada 166 unit kursi roda dan tongkat alat bantu yang sudah dibagikan bagi masyarakat Indramayu. “Adapun alat bantu yang telah disalurkan itu atas usulan saya sendiri dan semoga bantuannya dapat digunakan sebaik mungkin bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat,” tutupnya. •tn/es

Agung Budi Santoso: Bantu Pemerintah Capai ‘Herd Immunity’

“Kita lakukan baksos ini sebagai wujud niat baik dan ikhtiar bersama, membantu saudara kita yang terdampak pandemi baik secara kesehatan maupun ekonominya,”

pendaftar vaksinasi mencapai ribuan orang. “Antusias warga sangat bagus, dari kuota 500 (dosis vaksin) namun yang mendaftar sampai ribuan,” sambungnya.

Untuk itu, Agung menegaskan bahwa pihaknya siap membantu pemerintah untuk mengejar target *herd immunity* secara nasional. “Kami mau jika dilibatkan oleh pemerintah Cimahi untuk sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya vaksin. Karena kader kami sampai di tingkat kelurahan ada, intinya kami siap membantu pemerintah,” tegasnya. ● [bia/es](#)

Di tengah situasi pandemi yang berkepanjangan, salah satu wujud niat dan ikhtiar dalam membantu masyarakat terdampak pandemi adalah dengan bersama mengajak setiap komponen masyarakat melakukan vaksinasi.

Seperti yang dilakukan oleh Anggota Komisi III DPR RI Agung Budi Santoso yang menyelenggarakan kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat di daerah pemilihannya Jawa Barat I meliputi Kota Cimahi dan Kota Bandung.

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini bekerja sama membantu pemerintah mencapai *herd immunity*. Dimana, sejumlah seribu dosis vaksin Coronavac diberikan kepada 500 orang di Kota Bandung dan 500 orang di Kota Cimahi.

“Saya melakukan kegiatan vaksin gratis untuk masyarakat Cimahi mengingat dapil saya adalah Kota Cimahi dan Kota Bandung. Maka saya bagi menjadi 500 untuk Kota Bandung dan 500 untuk Kota Cimahi,” imbuhnya.

Politisi fraksi Demokrat ini melihat kegiatan vaksinasi tersebut diikuti warga dengan antusias, bahkan



Anggota DPR RI Agung Budi Santoso yang menyelenggarakan kegiatan vaksinasi Covid-19.



FOTO: IST/PDT

Slamet: Gelar Sekolah dan Pasar Tani untuk Sejahterakan Petani

“Pasar tani PKS adalah bentuk keberpihakan PKS terhadap petani dan pelayanan kepada masyarakat”

Sebagai wakil rakyat, selayaknya Anggota DPR RI berupaya mendengarkan berbagai permasalahan dan aduan masyarakat, sekaligus menindaklanjutinya dengan sejumlah solusi efektif. Tak melulu saat reses, kapanpun, di manapun wakil rakyat selalu membuka diri untuk mendengar setiap aspirasi yang disampaikan konstituennya.

Seperti yang dilakukan Anggota DPR RI Slamet baru baru ini yang melakukan pertemuan dengan komunitas dan individu kaum muda penggerak budidaya ikan hias dan ibu-ibu wanita tani desa.

Selain bersilaturahmi, Anggota yang mewakili Jawa Barat IV meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi ini menggelar kegiatan sekolah tani dan pasar tani di Kampung Raden Agro Park Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, penghujung April lalu.

Kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ini merupakan bagian dari gerakan besar sekolah tani ternak nelayan PKS yang berjuang mewujudkan kesejahteraan ribuan petani, peternak, dan nelayan muda.

Slamet mengatakan cara membentuk petani muda sejahtera



FOTO: IST/PDT

Anggota DPR RI Slamet saat menggelar Pasar Tani PKS di dapilnya

adalah dengan membuktikan bahwa hasil dari usaha tani bisa mencukupi bahkan lebih untuk kebutuhan hidup serta keinginan mereka.

Dan salah satu bentuk wujud keberpihakan atau pembelaan PKS terhadap petani adalah juga membeli hasil tani dengan harga yang layak agar petani dapat bertahan dan berkembang. “Kemudian membantu menjual ke masyarakat dengan harga normal sehingga dapat memberikan

produk terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan kerja sama melalui Koperasi Sukabumi Berkah Berdaya (Sumber Daya). Koperasi tersebut membeli gabah Petani dengan harga layak dan menjual ke masyarakat dengan kemasan premium serta kualitas yang baik sesuai permintaan pasar.

Untuk peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah komunitas dan individu kaum muda penggerak budidaya ikan hias dan ibu-ibu wanita tani desa. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan Kartu Tanda

Anggota atau KTA PKS oleh Ketua DPD KPS Kabupaten Sukabumi Muhamad Sodikin kepada peserta kegiatan.

Masyarakat sekitar Cisande dan peserta sekolah tani merasa senang karena mendapatkan beras kemasan premium serta minyak goreng yang kini menjadi barang langka serta maha. Di samping itu, masyarakat juga mendapatkan sayuran yang *fresh* dengan harga bersaing. ●nm/es

Slamet Ariyadi : Apresiasi Pendampingan Akselerasi Ekspor Pertanian Bagi Petani

“Saya mengapresiasi kinerja ekspor pertanian yang secara sistematis dibangun baik dari sisi hilir, hulu hingga percepatan layanan di Barantan”

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Barantan Wisnu Haryana menyebutkan dari sistem lalu lintas komoditas pertanian, IQFAST Barantan hingga saat ini briket arang tempurung kelapa asal Pulau Madura telah rutin memasuki pasar ekspor. Selain itu daun kelor dan cabe jamu mulai dilirik pasar global.

Harapannya, dengan adanya pendampingan bimtek ini, komoditas daun kelor dan cabe jamu dapat segera memasuki pasar ekspor, sehingga makin banyak ragam komoditas yang diekspor dari pulau Madura.

Wisnu menambahkan, komoditas mente, mangga, melon, semangka dan porang juga memiliki potensi yang besar. Produktivitasnya tinggi, kualitasnya baik dan peluang



FOTO: IST/PDI

Anggota DPR RI Slamet Ariyadi mengadakan Bimtek Akselerasi Ekspor Pertanian di Sampang, Madura.

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet Ariyadi mengapresiasi pendampingan akselerasi ekspor pertanian berupa bimbingan teknis persyaratan negara tujuan yang dilakukan Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian. Bimtek ini dilakukan di Kabupaten Sampang, Madura dengan diikuti oleh 100 petani.

Kegiatan bimtek ini dinilai sangat tepat untuk menjaga momentum peningkatan ekspor yang hingga saat ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. “Pendampingan ini

selain menambah akses informasi juga sekaligus menambah semangat para petani di lapangan,” ucap Slamet saat membuka bimtek di Sampang, Madura, baru-baru ini.

Slamet menghimbau para petani untuk juga bersama-sama melakukan transformasi melalui cara tradisional menuju cara digital guna menghadapi industri 4.0, dimana semua akses harus dibuka secara transparansi.

“Momentum ini kita jaga bersama. Gunakan dan manfaatkan aplikasi informasi ekspor dari Barantan untuk menambah ragam komoditas dan pasar ekspor,” ujar anggota DPR RI Fraksi PAN ini.

pasar ekspornya masih terbuka lebar. Bersama dengan Direktorat Teknis di Kementerian Pertanian (Kementan) dan instansi terkait di daerah, akan terus berupaya meningkatkan produksi dalam negeri melalui penyediaan benih unggul dan akses biaya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kemudian, Barantan yang diberi tugas oleh Menteri Pertanian selaku koordinator Gerakan Tiga Kali Lipat Pertanian (Gratieks) akan fokus dalam mengakselerasi layanan, memperkuat sinergisitas dan harmonisasi aturan serta protokol teknis ekspor. ●gal/es

Syaifullah Tamliha: Akan Perjuangkan Bandara Baru di Tabalong

“Secara ekonomis (Bandara Tabalong) bisa menjadi penyangga IKN baru, karena lokasinya itu berada di tiga persimpangan provinsi, itu juga atas usulan dari kita”

Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha mengungkapkan, Kabupaten Tabalong direncanakan akan memiliki bandar udara (bandara) baru. Bandara tersebut persisnya berlokasi di Kecamatan Kambitin yang juga merupakan kantor Basarnas.

Hal itu disampaikan Syaifullah Tamliha usai mengunjungi dapilnya Kalimantan Selatan (Kalsel) I, akhir April lalu. Disampaikan Syaifullah, pihaknya juga sudah menyepakati dalam waktu dekat dengan BMKG untuk mulai melakukan penelitian dan kajian terhadap arah angin, suhu, cuaca dan sebagainya, apakah itu nantinya layak menjadi bandara.

Untuk merealisasikan pembangunan bandara baru itu, idealnya minimal luas lahannya sekitar 200 hektare dan jika ingin menjadi bandara internasional butuh lahan sekitar 1.000 hektare. Dipilihnya lokasi di Kambitin, sambungnya, karena jarak jalan tol dari Tabalong ke titik nol kilometer lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru itu, sekitar 139 kilometer. Menteri Perhubungan menyatakan setuju asalkan jaraknya melebihi 200 kilometer dari bandara terdekat.

Selain itu, antara Kambitin-Bandara Syamsuddin Noor berjarak sekitar 240 kilometer dan sekitar 300 kilometer dari Bandara Sepinggang Balikpapan. “Secara ekonomis bisa menjadi penyangga IKN baru, karena lokasinya itu berada di tiga persimpangan provinsi, itu juga atas usulan dari kita,” jelas politisi Fraksi PPP ini.

Hal yang lebih penting lagi, menurutnya, kondisi tersebut sudah ditunjang infrastruktur jalan. Mengingat, jalan dari Bandara Syamsuddin Noor sampai perbatasan Penajam kondisinya sudah tidak ada lagi lobang. Bahkan jembatan Paringin sudah dibuka aksesnya, kemudian jalan Pantai Hambawang Amuntai sampai Kalua juga sudah mulus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar segera membangun bandara internasional di wilayah Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perluasan Bandara Waru Kin yang terlebih dulu ada saat ini.

Tamliha menegaskan, Provinsi Kalsel memiliki lahan yang terbilang cukup besar dan representatif untuk dibangun sebuah bandara internasional. Terlebih di sekitar Tabalong merupakan suatu titik wilayah yang terbilang sangat strategis karena letaknya yang berada di segitiga emas, yakni berada di antara Kalsel dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang kini sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru. ●hal/es



Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha

FOTO: IST/PDI



Edi Dimiyati

Sebarkan Minat Baca, Hampiri Pemustaka dengan Kargo Baca

FOTO: DOC/PDT

“Bukan diukur dari sebuah plakat penghargaan, bukan pula ditakar dari seberapa banyak lembar piagam yang diterima. Kesuksesan dalam mengemban misi literasi baru bisa dikatakan tuntas saat akses bahan bacaan bisa tersampaikan ke pelosok negeri”

(taman baca) *deket* rumah’. Awalnya *sih* dari keluhan seperti itu, jadi *wah* iya *nih* harus menghampiri mereka,” cerita Edi tentang lahirnya Kargo Baca.

Sejak tahun 2012, Edi Dimiyati menggawangi sebuah taman baca

Entah sudah berapa ratus kilometer jalan yang dilalui Edi bersama Kargo Baca, perpustakaan bergerak yang digagasnya sejak 2017. Tak hanya Jakarta, Edi telah bertualang bersama sepedanya menyambangi para pemustaka di berbagai kota.

“Selama ini Kampung Buku melayani akses informasi *tuh* menetap, banyak juga orang-orang atau pemustaka yang pernah kesini tapi tinggalnya jauh. Jadi mereka bilang *wah* coba ada yang kayak gini





di bilangan Cibubur, Jakarta Timur yang ia beri nama 'Kampung Buku'. Awal tahun 2017, Edi mulai berkeliling membawa buku-buku koleksinya menggunakan sepeda motor. Baru di bulan September, ia mulai menggowes sepeda kargo karya Alam Project untuk menyambangi para pemustaka cilik yang menjadi target utamanya.

"Sebenarnya produknya *kan* mengampanyekan minat baca ya, *ngajak* anak-anak megang buku *lah* minimal. Kalau kita nawarin produk harus menarik *dong*, *bikin* orang penasaran dulu. Yang *bikin* menarik ya ini, sepeda," tuturnya.

Kabaca (singkatan dari Kargo Baca) biasa menepi di berbagai tempat di sekitar Kecamatan Ciracas mulai dari taman, RPTRA, masjid bahkan tak jarang Edi juga memberanikan diri 'mangkal' di sekitar kegiatan warga seperti saat 17-an, acara donor darah hingga sunatan.

Sekali *trip*, Kabaca mampu memuat 80 judul buku yang tersimpan di peti depan. Edi mengaku membatasi jumlah bawaannya karena ada muatan lain yang harus ia bawa. Aneka permainan edukasi dan hadiah tak lupa diangkut di saku kanan dan kiri sepeda, gunanya sebagai 'senjata' menarik perhatian anak.

Harus menjadi teman, begitulah prinsipnya. Oleh karena itu tak jarang Edi melakukan pertunjukan sulap sederhana, atraksi yoyo hingga tebak-tebakan dan memainkan bermacam mainan *jadul*.

"*Biar* anak-anak senang kadang (Kabaca) beralih fungsi jadi odong-odong *hahaha*. Jadi bukunya *dikeluarin* taruh di karpet, tutup peti dibuka *nah* anak-anak naik di situ, terus keliling-keliling. Jadi ada kedekatan *tuh*, *nggak* *ujug-ujug* kita datang terus *nyuruh* baca. *Nggak* bisa *lah* kayak gitu," cerita Edi sambil berkelakar.

Berjejaring, bertualang dan menulis

Meski biasanya Kabaca 'beredar' di sekitar wilayah Kecamatan Ciracas, namun ada kalanya Edi harus menggowes lebih jauh seperti yang dilakukannya pada September 2017. Bersama beberapa rekannya, lulusan Ilmu Perpustakaan Universitas Padjadjaran ini bergantian mengayuh Kabaca berkeliling berbagai kabupaten di Jawa Barat. Perjalanan selama 11 hari

ini tak lain dengan tujuan peringatan Hari Aksara Internasional tingkat nasional yang saat itu dihelat di Kabupaten Kuningan. Setali tiga uang, Edi juga menjadikannya sebagai momentum melaksanakan nazar untuk menyebarkan virus membaca.

Edi merasa semua yang dilakukannya tak lepas dari dukungan jaringan komunitas. Seperti pada perjalanan keliling Jawa Barat, ia mengaku hanya merogoh Rp400 ribu untuk semua keperluan tim. Oleh karena itu, kemana pun ia pergi maka sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk bertandang ke komunitas dan taman bacaan setempat. Termasuk saat berujung ke Purbalingga awal 2022 lalu.

Banyak pihak yang telah mengapresiasi usaha yang dilakukan Edi dalam menyebarkan 'virus membaca', tak ayal ayah dua anak ini pun diganjar berbagai penghargaan. Mulai dari almamaternya hingga digadang sebagai 'Komunitas Program Inspirasi' dalam Bike to Work Indonesia Award 2021.

Langkah pria berdarah Sunda, tak terhenti di piagam dan plakat. Masih ada segudang rencana ke depan untuk terus menanamkan minat baca seperti program mengirimkan buku gratis ke berbagai taman di Indonesia dalam 'Kargo Baca Hadiah Buku' ataupun 'Harta Karun Buku' yang secara sengaja meninggalkan buku dengan pesan tertentu di area-area publik.

"Kalau sekarang disebut penggiat literasi *tuh*, *kayak* sebuah titel yang agung. *Duh* jangan *deh hahaha*. Makanya lebih *seneng* disebut penulis *sih* ya," ungkap Edi yang telah menghasilkan 10 judul buku ini sambil bercanda.

Meski enggan disebut sebagai penggiat literasi, Ayah dua anak tetap menerima jika memang ada orang yang menyematkan predikat itu padanya. Namun di, balik itu Edi lebih ingin dikenang dan dikenal sebagai penulis. Menurutnya menulis menjadikan seseorang abadi. ●uc,we/es



Audit Internal, Komitmen Setjen DPR Wujudkan Lembaga *Good Governance*



FOTO: RSB/PDI

Suasana Seminar Nasional 'Strategi Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien. Dalam pelaksanaannya, ***Good governance*** fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam hal pemakaian sumberdaya organisasi sejalan dengan tujuan organisasi

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, untuk menciptakan governance yang efektif dibutuhkan audit internal yang independen agar tata kelola efektif dapat tercapai, diperlukan internal auditor yang mampu bersikap objektif, kompeten, independen dan dapat dipercaya.

"Selain untuk mengawasi operasional organisasi, dengan

mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko dan kontrol, auditor internal juga bertanggung jawab dalam menciptakan tata kelola yang baik di organisasi," ujar Indra saat seminar nasional yang bertajuk 'Strategi Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk Meningkatkan Tata Kelola Organisasi di Sekretariat Jenderal DPR-RI' di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, akhir Mei lalu.

Seminar tersebut menghadirkan beberapa pakar mulai dari Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP RI Ikhwan Mulyawan, Plt. Auditor Utama Keuangan Negara III BPKP RI Dr. Ahmad Adib Susilo, Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI Dr. Alexander Zulkarnain, serta Chief Audit Risk Management Advisory PT. Astra Otoparts (Tbk) Surya Ningrum.

Bagi para auditor, Mei dikenal sebagai bulan membangun kesadaran tentang pentingnya peran audit internal di seluruh dunia atau yang dikenal dengan International Internal Audit Awareness Month. Acara peringatan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi auditor internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk lebih meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya.

Indra menjelaskan, dalam perkembangan pemenuhan unsur dan sub unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau e-SPIP perlu dikaitkan dengan pencapaian empat tujuan penyelenggaraan SPIP seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

"(Tim) Auditor internal dikatakan kredibel apabila memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang kecukupan dan efektivitas tata kelola manajemen risiko. Pengendalian, memberikan wawasan dan saran yang relevan dan andal akan mendorong inovasi serta perbaikan integritas serta menjadi contoh dalam penerapan etika nilai dan transparan dalam organisasi," terang Indra.

la melanjutkan, hal-hal di atas perlu dibangun dan pahami bersama sama agar pemahaman mengenai fungsi dan audit internal dapat menjadi lebih dipahami manfaat dari pekerjaan audit internal bila dapat bekerja dengan baik sehingga bisa meningkatkan dukungan untuk audit.

Auditor internal, terang Indra, dituntut untuk mampu menyampaikan kebenaran melalui proses kerja yang baik dengan komunikasi yang konstruktif. Selain itu juga dapat memberikan saran yang dapat membantu para pemangku kepentingan untuk dapat memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik dan berbasis risiko dengan tujuan agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif efisien etis dan yang penting adalah berkelanjutan.

la berharap, dengan kehadiran auditor internal yang kompeten di Kesetjenan DPR RI dapat meningkatkan tata kelola organisasi menjadi lebih baik lagi. Sebab, unit



“

...dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan sub unsur e-SPIP dikaitkan dengan pencapaian empat tujuan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Perpres 60 Tahun 2008

Setyanta Nugraha
Inspektur Utama Setjen DPR RI

FOTO: RUNI/PDT

internal yang kompeten akan mampu melaksanakan kegiatan selaras dengan prioritas organisasi serta punya komitmen dan standar yang tinggi menegakkan aturan-aturan Organisasi.

Manajemen Resiko dan e-SPIP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan bahwa seluruh kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota wajib mengimplementasikan manajemen risiko dan menetapkan target indeks manajemen risiko pada level 3.

Manajemen risiko dan e-SPIP merupakan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi. yang keduanya diperhitungkan sebagai nilai sasaran antara dalam mengungkit atau leaflet yang langsung berpengaruh kepada nilai atau indeks reformasi birokrasi

Inspektorat Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha menerangkan bahwa dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan sub unsur e-SPIP dikaitkan dengan pencapaian empat tujuan penyelenggaraan

SPIP sesuai dengan Perpres 60 Tahun 2008. Oleh karena itu, BPKP melalui Peraturan Kepala BPKP telah menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 yaitu memperbaharui telah memperbaharui metodologi penilaian.

Hal itu mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil disamping menilai unsur dan Sub unsur SPIP, untuk menghasilkan nilai yang terintegrasi. Nilai tersebut yaitu skor maturitas SPIP kemudian indeks penerapan manajemen risiko dan indeks efektivitas pengendalian korupsi atau IEPK.

"Sebagai pedoman yang baru lahir di tengah pandemi Covid-19, tentunya pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi belum dapat dilakukan secara optimal setidaknya yang kami akui di Sekretariat Jenderal DPR RI," lanjut Totok, sapaan akrabnya.

Melalui seminar ini, Totok berharap dapat memperoleh dan mendengarkan pencerahan dari berbagai perspektif baik dari BPKP sebagai regulator dan pembina profesi auditor. "Kemudian kita juga bisa mendengarkan best practices atau praktik terbaik penerapan SPP terintegrasi di Kementerian Keuangan dari para narasumber," pungkasnya. ● hal/es



Oleh: **dr. Rolliawati Ameria S.D.**

Dokter Utama
Biro Umum Setjen DPR RI

Tips Jaga Kesehatan Kadar Kolesterol Dalam Tubuh Setelah Lebaran

Momen Lebaran selain menjadi acara berkumpul dan bersilaturahmi bersama, juga identik dengan dihiasi oleh berbagai jenis makanan seperti ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng kentang, kue-kue kering, dan berbagai jenis makanan khas daerah lainnya. Hampir semua hidangan makanan Lebaran ini mengandung santan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh.

Kolesterol merupakan senyawa lemak yang sebagian besar diproduksi oleh hati dan dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun sel-sel sehat. Lemak ini juga biasa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan susu. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh selain untuk membangun sel-sel sehat agar tubuh bisa berfungsi secara normal, juga dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D, memproduksi sejumlah hormon, dan memproduksi asam empedu untuk mencerna lemak dalam proses pencernaan.

Jika kadar kolesterol tinggi, maka hal ini berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Lantaran meningkatnya kolesterol akan membuat penumpukan plak lemak di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah akan mengeras dan menyempit. Penyempitan menyebabkan aliran darah terganggu, kemudian hal ini akan meningkatkan resiko berbagai jenis penyakit seperti jantung, hipertensi, dan stroke.



“

Kadar kolesterol dalam tubuh yang disarankan untuk setiap orang bervariasi. Hal ini tergantung dari apakah orang tersebut memiliki risiko lebih tinggi atau lebih rendah untuk terkena penyakit pembuluh darah arteri. Namun, batas aman kadar kolesterol normal dalam tubuh adalah < 200 mg/dl.



Kadar kolesterol dalam tubuh yang disarankan untuk setiap orang bervariasi. Hal ini tergantung dari apakah orang tersebut memiliki risiko lebih tinggi atau lebih rendah untuk terkena penyakit pembuluh darah arteri. Namun, batas aman kadar kolesterol normal dalam tubuh adalah < 200 mg/dl.

Pemeriksaan kadar jumlah kolesterol dalam tubuh dapat diukur melalui tes darah. Sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan jika mengalami gejala seperti kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, mengidap diabetes atau penyakit lainnya yang dapat

meningkatkan kadar kolesterol. Selain itu, jika keluarga ada yang mengidap penyakit akibat kolesterol atau riwayat kardiovaskular pada usia dini, maka diagnosis terhadap kadar kolesterol pun sangat dianjurkan.

Untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh, perlu menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Pola hidup sehat ini dapat dimulai dengan cara memulai gaya hidup sehat dengan pola makan bergizi lengkap dan seimbang. Selain itu, dengan berhenti merokok, tidak minum alkohol, dan mengontrol berat badan.

“

Melakukan olahraga secara rutin juga merupakan cara untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Dengan melakukan olahraga secara rutin, bisa dapat menjaga berat badan tetap ideal.



Melakukan olahraga secara rutin juga merupakan cara untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Dengan melakukan olahraga secara rutin, bisa dapat menjaga berat badan tetap ideal. Olahraga juga dapat merangsang enzim yang membantu memindahkan kolesterol jahat dari darah dan dinding pembuluh darah ke hati. Kemudian dari hati, kolesterol dicerna menjadi empedu dan dikeluarkan dari tubuh.

Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan ukuran partikel protein pembawa kolesterol via darah. Dengan rajin melakukan olahraga, dapat menjaga kadar kolesterol jahat dalam darah karena olahraga dapat mengeluarkan kolesterol jahat dari tubuh. Olahraga juga dapat mengontrol kolesterol agar tidak membahayakan kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Beberapa jenis olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh yaitu, lari, jalan kaki, bersepeda, berenang, angkat beban dan yoga. Untuk menjaga kadar kolesterol tubuh, selain berolahraga juga perlu diimbangi dengan mengonsumsi makan-makanan sehat seperti memperbanyak buah dan sayur, mengurangi makanan yang mengandung gula, dan membatasi asupan makanan yang mengandung kolesterol tinggi.

Beberapa makanan yang mengandung kolesterol tinggi yakni gorengan, makanan yang menggunakan mentega, kuning telur, santan, produk *dairy* seperti susu full krim, keju, es krim, krim kocok. Kemudian makanan cepat saji seperti *hotdog*, *burger*, *bacon*, dan *pizza*. Ada pula *seafood* seperti udang, cumi, lobster, dan kerang tiram. Selain itu, jeroan dan otak serta daging ayam berlemak seperti pada bagian paha, sayap, ekor, dan kulit. ●

Surga Bahari

di Ujung Selatan Sulawesi

Pulau Sulawesi menyimpan beragam keindahan alam yang tidak kalah dibandingkan dengan pulau - pulau lainnya di penjuru Indonesia. Jika Lombok punya Gili Trawangan, Bulukumba punya Tanjung Bira. Pantai eksotis dengan pemandangan indah yang memikat.

Berada di ujung Selatan pulau Sulawesi, pesona Tanjung Bira tak perlu diragukan lagi. Sepanjang mata mengedarkan pandang, terbentang lautan luas, sebening kaca dengan hamparan pasir putih. Keindahan pantai ini bahkan terkenal hingga ke mancanegara.

Letaknya memang lumayan jauh, namun pemandangan yang didapatkan juga sepadan. Terletak di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, wisatawan bisa menempuh perjalanan dari Bulukumba yang memiliki jarak sekitar 40 km. Sementara jika dari Makassar jaraknya sekitar 200 km. Total waktu yang ditempuh membutuhkan waktu 4 - 5 jam untuk sampai di lokasi.

Setiba di area pantai, wisatawan dapat menikmati suasana pantai yang relatif tenang. Keindahan pantai berpasir putih dan lautnya yang biru dapat dinikmati layaknya pantai pribadi. Suasana nyaman yang disuguhkan

memberikan efek relaksasi, terutama di pagi hari .

Pantai Tanjung Bira memiliki pasir putih dengan tekstur halus seperti tepung, sehingga tak heran banyak wisatawan bertelanjang kaki berjalan di pesisir pantai sambil menikmati pemandangan di sisi timur pantai, dengan perbukitan batu kapur yang tertata rapi secara alami.

Tidak hanya dikenal akan pemandangan alam yang indah, pantai ini juga kerap disebut sebagai surganya para penyelam. Ada banyak *spot diving* yang tak boleh terlewatkan saat mengunjungi Tanjung Bira. Dilansir dari berbagai media, berikut beberapa destinasi baru di Kawasan Wisata Tanjung Bira yang bisa kamu nikmati

PANTAI BIRA

Pantai Bira adalah destinasi wisata utama di Tanjung Bira. Pantai Bira berupa pantai pasir putih dengan



FOTO: RICKY KUIKEO

butiran yang halus, dengan lebar pantai sekitar 50 meter dan panjang lebih dari 1 kilometer. Pantai ini sangat landai, berair jernih dan dangkal menyerupai kolam renang raksasa.



Pantai Bira adalah tempat yang sangat bagus untuk bermain air dan berenang di laut. Tersedia berbagai permainan rekreasi pantai, seperti banana boat dan donat boat. Dataran Pantai Bira yang luas cocok untuk kegiatan outdoor seperti voli pantai.

PANTAI BARA

Pantai Bara terletak bersebelahan dengan Pantai Bira, namun akses masuk yang berbeda. Pantai Bara terletak di ujung barat, sementara Pantai Bira di ujung timur. Sama halnya dengan Pantai Bira, Pantai Bara memiliki karakteristik yang sama hanya saja tidak seramai Pantai Bira. Tak jarang, wisatawan mendirikan tenda dan ber-camping di tepi pantai.

PANTAI PANRANG LUHU

Pantai Panrang Luhu terletak di pantai timur Tanjung Bira, bersebelahan dengan Pelabuhan Bira. Pantai Panrang Luhu membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang sekitar 1,5 kilometer, menghadap ke arah timur. Di ujung utara Pantai Panrang Luhu terdapat galangan kapal Pinisi, sedangkan di ujung selatan terdapat Pelabuhan Bira. Pantai Panrang Luhu sejajar dengan Jalan Poros Pelabuhan Bira, berjarak hanya sekitar 100 meter.

Seiring dengan semakin banyaknya hotel dan penginapan di

sepanjang Pantai Panrang Luhu, kegiatan wisata di kawasan ini semakin berkembang dan semakin tertata. Pantai Panrang Luhu mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Dibanding dengan Pantai Bira dan Pantai Bara, suasana pantai ini masih tampak asri dan alami.

DESA BIRA, PEMBUATAN KAPAL PINISI

Tanjung Bira merupakan sentra pembuatan kapal Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal kayu legendaris dari suku Bugis dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-14. Kapal Pinisi juga ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO.

Tak seperti pembuatan kapal pada umumnya, warga lokal menggunakan teknik tradisional, tanpa gambar rancang bangunan dan menggunakan peralatan yang sederhana. Pekerja membuat kapal dengan ilmu yang diwariskan secara turun-temurun.

Pembuatan kapal Pinisi di Tanjung Bira dilakukan di bibir pantai, di mana bagian haluan kapal menghadap ke laut. Pada saat kapal Pinisi selesai dibuat, maka kapal tersebut akan ditarik ke laut oleh ratusan orang. Pembuatan kapal Pinisi dan proses pelepasan kapal ke laut merupakan atraksi wisata yang menarik. ● ann/es



Paryono

Tenteram Kala Berada di Kebun

“Saya itu dari kecil memang sudah suka berkebun, sudah suka beternak. Jadi tidak pernah terputus, dari dulu soal tanam-menanam, dan soal ternak-beternak”

Paryono di tengah kebun miliknya.

Di tengah padatnya aktivitas sebagai wakil rakyat, istirahat menyalurkan kesenangan memang diperlukan agar pikiran kembali segar-bugar. Seperti yang dilakukan oleh Anggota DPR RI Paryono, *refreshing* ala Paryono adalah ketika melihat kebun dan ternak miliknya.

Wakil Bupati Karanganyar periode 2008-2013 ini merasa tenteram jika sudah berada dan melihat seisi kebun miliknya. “Saya itu dari kecil memang sudah suka berkebun, sudah suka beternak. Jadi tidak pernah terputus, dari dulu soal tanam-menanam, dan soal ternak beternak. Tapi ya masih sebatas hobi dan hiburan saja, belum kearah industri,” ungkap Paryono pada **Parlementaria** baru-baru ini.

Di atas lahan seluas tiga hektar di Kabupaten Karanganyar itu, Paryono menanaminya dengan beberapa varian buah-buahan. Ada jeruk keprok tawangmangu, ada Jeruk Simadu, ada Klengkeng, beberapa jenis jambu, papaya dan banyaklah. Jadi

kalau soal buah kita *gak* pernah beli. Kita juga bisa berbagi ke saudara dan tetangga,” terangnya.

Di samping menanam buah, Paryono juga memanfaatkan lahannya dengan mengembangbiakan beberapa hewan ternak seperti kambing, bebek, entok, kelinci, ayam, hingga ikan.

“Jadi kayak ayam, bebek, entok kita *gak* usah beli lagi. Ikan itu di setiap kita punya tanah, dan ada airnya. Bahkan di rumah saya, pasti ada ikannya. *Ya*, namanya juga hobi *ya*,” tambah anggota DPR Komisi VIII ini.

Untuk mengurus tanaman dan ternaknya, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mempekerjakan 5 orang karyawan yang terdiri dari masyarakat sekitar. Tentu saja sesekali ia turun tangan turut membersihkan kebun yang berjarak hanya 20 menit dari kediamannya di Karanganyar. “Jadi setelah bertemu konstituen atau memenuhi undangan masyarakat sebisa mungkin menyempatkan diri ke kebun,” jelasnya.

Kedepan, jika buah dikebunnya sudah berbuah semua, ia berharap bisa dijadikan wisata kebun petik buah yang tentu akan menumbuhkan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar.

“Jeruk mungkin tahun depan kita bisa panen, tapi kalau pisang dan jambu kristal kita tiap minggu selalu bisa ambil. Kalau butuh, atau mau *ngundang* teman, kita bisa ambil sendiri. Nanti kalau sudah berbuah semua, kita bisa buat wisata petik buah. Hobi itu bikin senang, dan kalau bisa menghasilkan. (di kebun) ada gubug, kita bisa ngopi, makan di situ, tenteram,” tutupnya. ● **we/es**



Getar Pilu Ratapan Guru

Wajah-wajah penuh harap itu datang menghadap, mengadu kepada para pemangku, memohon ada kebijakan atas kelangsungan nasib mereka yang terpinggirkan. Tersedu meratapi kisahnya yang pilu setelah berkali-kali gagal dalam ujian sertifikasi kelayakan profesi.



Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI menerima aduan dari Forum Guru Eks PLPG 2016

FOTO: DEVI/PDT

jawaban yang mirip kentara, menjebak langkah seolah ikut memperdaya.

Dihadapan Anggota Dewan yang mengawal bidang pendidikan, para guru perwakilan rekan seprofesi dari seluruh provinsi yang gagal seleksi sertifikasi menyampaikan sebuah permohonan agar ada suatu solusi kebijaksanaan yang bisa diperjuangkan untuk bisa diterapkan menyangkut status mereka yang telah lama diidamkan.

Miris dan menangis, karena banyak diantara para guru itu juga yang tak lama lagi harus akan masuk masa purnabakti. Bahkan ada yang hingga akhir hayatnya masih terus berharap mereka bisa diluluskan dan mendapatkan pengakuan.

Mungkin ada diantara anak didik mereka yang telah menjadi orang sukses dalam karirnya, atau menjadi bibit pemimpin negeri ini di masa yang akan datang sebagai buah ilmu dari keikhlasan yang telah diajarkan. Jangan biarkan guru-guru itu hanya bisa dikenang sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, tetapi tingkatkanlah taraf hidup mereka agar mendapat kesejahteraan yang seimbang dan berkeadilan sebagai balas budi penghormatan baktinya.

● dep,mh/es

ni bukan semata soal *salary*, tetapi juga tentang martabat dan harga diri. Setelah bertahun-tahun mengabdikan namun keberadaannya seakan tak diakui dan kalah dengan rekan seprofesi yang notabene sebagai pendatang baru di dunia pendidikan masa kini.

Ujian sertifikasi dengan format kekinian dirasa berat dan tidak menguntungkan. Meski telah dilakukan dengan semangat maju tak gentar, tetapi apalah daya untuk memegang 'mouse' komputer saja tangan mereka lemah bergetar. Soal-soal pilihan ganda dengan



TERISAK: Salah satu peserta perwakilan Forum Guru Eks PLPG 2016 menyampaikan keluhannya.



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
MENGUCAPKAN :



SELAMAT HARI LAHIR
PANCASILA
1 Juni 2022